

LAPORAN TAHUNAN
PT BPR NEHEMIA
PERIODE 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami menyampaikan Laporan Tahunan 2024, yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan operasional BPR selama satu tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2024 BPR masih tetap berupaya mempertahankan kinerja dengan menjaga pertumbuhan pos-pos inti BPR agar tetap betumbuh dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 pertumbuhan BPR Nehemia masih melambat, selain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, kebijakan manajemen BPR untuk lebih hati-hati dalam menjalankan usaha, intinya pelaksanaan strategi usaha mengacu pada Rencana Bisnis BPR Nehemia.

Mengawali laporan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepercayaan dan kerjasamanya pada PT BPR Nehemia sehingga tercipta suatu jalinan yang saling menguntungkan semua pihak. Kami menyadari bahwa semua yang telah di capai belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, namun kami akan terus berupaya dan berkarya untuk memenuhi harapan tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengurus dan seluruh karyawan atas kerja samanya dalam upaya ikut mengembangkan PT BPR Nehemia.

Laporan ini di susun berdasarkan laporan keuangan PT BPR Nehemia yang telah diaudit okeh Kantor Akuntan Publik Prof.Dr.H.Tb. Hasanuddin, M. Sc. & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan kami berharap laporan ini dapat menggambarkan seluruh aktivitas operasional bank di tahun 2024, kami sadar bahwa dalam penyajiannya masih banyak kekurangannya.

Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan laporan tahunan ini, semoga BPR Nehemia tetap sehat, tumbuh berkembang dan menghasilkan.

Terima Kasih

Padalarang, 06 Mei 2025

Dewan Direksi

Kode Form	: Form A.01.01
Nama Form	: DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan OJK		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
						No. SK	Tanggal SK		
1	Edrianto Sitorus	Kab. Bandung Barat	Direktur Utama	19/09/2022	19/09/2027	KEP-14/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	12/04/2027
2	Nimas Ayu Pamungkas	Kab. Bandung Barat	Direktur	19/09/2022	19/09/2027	KEP-1/KR.02/2018	02/01/2018	Ya	12/04/2027
3	Rosi Rostianti	Kab. Bandung Barat	Komisaris Utama	19/09/2022	19/09/2027	KEP-16/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	09/11/2025
4	Pahala Silitonga	Kab. Bandung Barat	Komisaris	19/09/2022	19/09/2027	KEP-15/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	09/11/2025

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
S2	04/07/2019	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia	Rencana Bisnis Bank	23/11/2021	Perbarindo					Tidak	
D3	09/07/2005	Universitas Padjadjaran	Membangun BPR yang tangguh	17/12/2020	Perbarindo					Ya	
S1	23/02/1994	STIE Pasundan	Produktivitas SDM	28/12/2020	Perbarindo	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat		Ya
SLTA	30/04/1986	SMA Sipahutar	Membangun BPR yang tangguh	17/12/2020	Perbarindo	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat		Ya

Kode Form	: Form A.01.02
Nama Form	: DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
			Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya	
1	Rida Rosyidatul Ummah	Kab. Bandung Barat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Pejabat Eksekutif	Tidak Menjabat	22/04/2024

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite			
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
01/BN/DIR/SKPKT/IV/2024	22/04/2024	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat

Kode Form	: Form A.02.00
Nama Form	: DATA KEPEMILIKAN BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	Nama	Alamat	Jenis	Status pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Ultimate Shareholders
1	Robinson Sitorus	Kota Bandung	Perorangan	PSP	1.520.000.000	76.00	Ya
2	Edrianto Sitorus	Kab. Bandung Barat	Perorangan	Non PSP	480.000.000	24.00	Tidak

Kode Form	: Form A.03.01
Nama Form	: RIWAYAT PENDIRIAN BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Informasi	Keterangan
Nomor Akta Pendirian	3
Tgl. Akta Pendirian	19/08/1998
Nomor Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	5
Tgl Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	30/10/2024
Nomor Pengesahan dari Instansi yang berwenang	AHU-0069599.AH.01.02.TAHUN 2024
Tgl Pengesahan dari instansi yang berwenang	30/10/2024
Tanggal Mulai pelaksanaan kegiatan usaha	29/03/1990
Bidang Usaha sesuai Anggaran dasar	Bank Perkreditan Rakyat, mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tempat Kedudukan	Jl. Raya Padalarang No. 546 RT/RW 005/012 Kelurahan Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat 40553

PT. BPR Nehemia merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak dalam jasa perbankan, didirikan dengan akta Notaris tanggal 19 Agustus 1989 Nomor 3, di buat di hadapan Notaris Iwan Halimi, di Kabupaten Bandung, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 21 Februari 1990, No. C2-903.HT.01.01.TH.90 dan telah diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 03 April 1990 No. 27 tambahan berita Negara No. 1258/1990. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Ivana Natalia, SH. Nomor Akta 5 tanggal 30 Oktober 2024, AHU-0069599.AH.01.02.TAHUN 2024, mengenai perubahan Nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Nehemia menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Nehemia.

Kode Form	: Form A.03.02
Nama Form	: IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	2.515.298.100
Beban Operasional	2.483.781.397
Pendapatan Nonoperasional	-
Beban Nonoperasional	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum pajak	31.516.704
Taksiran Pajak Penghasilan	2.995.960
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	28.520.744

Kode Form	: Form A.03.03
Nama Form	: KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Aset Produktif	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank Lain	13.908.093.126	-	-	-	-	13.908.093.126
Kredit Yang diberikan						
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank – Pihak terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank – Pihak Tidak Terkait	6.189.480.800	44.832.800	82.499.500	74.942.900	1.519.302.050	7.911.058.050
Jumlah Aset Produktif	20.097.573.926	44.832.800	82.499.500	74.942.900	1.519.302.050	21.819.151.176
Jenis Rasio		Nilai Rasio (%)				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		124,75				
Rasio Cadangan terhadap PPKA		129,91				
Non Performing Loan (NPL) Neto		2,68				
Non Performing Loan (NPL) Gross		21,19				
Return on Assets (ROA)		0,16				
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)		98,75				
Net Interest Margin (NIM)		9,21				
Loan to Deposit Ratio (LDR)		75,72				
Cash Ratio		10,18				

Kode Form	: Form A.03.04
Nama Form	: PENJELASAN MENGENAI NON PERFORMING LOAN (NPL)
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Mayoritas rekening bermasalah merupakan debitur lama, jadi selama tahun 2024 relatif tidak ada penambahan kredit macet. Besaran NPL yang tinggi terpengaruh oleh bmenurunnya outstanding pinjaman yang diberikan, maka nominal penyebut dalam perhitungan rasio NPL semakin kecil dan hasilnya rasio NPL menjadi besar.
Langkah Penyelesaian	untuk memperbaiki rasio NPL yang retalif besar maka pelemparan kredit berkualitas baik harus selalu ditingkatkan, selain itu bpr akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah antara lain : Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan analis kredit melalui pendidikan dan pelatihan; mematuhi kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan; melakukan pemantauan kredit; melakukan penanganan kredit bermasalah dengan prioritas bobotnya, tetap selktif atas setiap pengajuan kredit.

Outstanding kredit Nett yang dimiliki BPR sampai dengan akhir Desember 2024 setelah dikurangi administrasi dan provisi kredit sebesar Rp. 7.858.502,- ribu, jumlah tersebut terbagi atas beberapa kolektibilitas atau kualitas kredit, antara lain : lancar 78,12%, dalam perhatian khusus 0,56%, kurang lancar 1,04%, diragukan 0,95% dan macet 19,33%.

Berdasarkan data tersebut diatas, kaitannya dengan prosentase NPL BPR menunjukkan adanya peningkatan NPL Gross dan penurunan NPL Net apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2024, NPL Gross BPR sebesar 21,19 % dan NPL Net BPR sebesar 2,68 %, adapun pencapaian NPL tahun sebelumnya masing-masing sebesar 20,59 % dan 2,85 %, dengan demikian peningkatan NPL Gross dan penurunan NPL Net masing-masing sebesar 0,60 % dan 0,17 %, BPR akan terus berupaya untuk menurunkan prosentase NPL dengan memperbaiki kualitas aktiva produktif yang dimiliki.

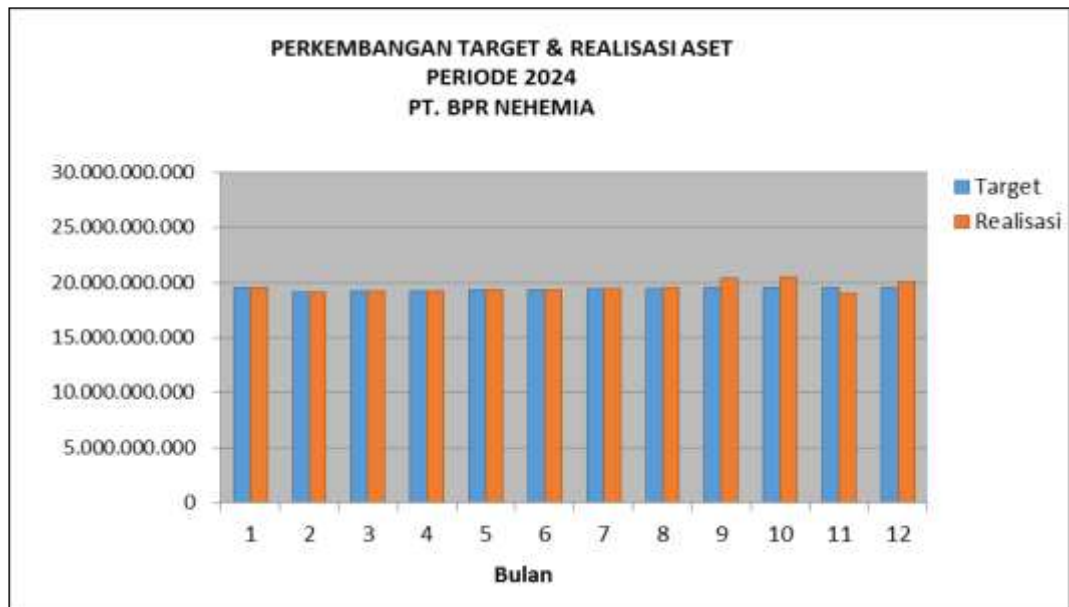
Kode Form	: Form A.03.05
Nama Form	: PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Perkembangan usaha BPR masih mengalami perlambatan, akan tetapi pencapaian target BPR sebagian besar terealisasi namun relatif kecil. Melemahnya kemampuan daya saing BPR dalam ekspansi produk khususnya produk kredit memberikan dampak signifikan pada perkembangan usaha BPR, ketidak mampuan BPR untuk bersaing dalam menghadapi dampak kondisi eksternal dan persaingan yang sangat ketat merupakan faktor dominan, adapun tingkat suku bunga dan biaya-biaya serta prosedur kredit masih bersaing dan wajar.

1. Perkembangan Aset

Pertumbuhan aset BPR tahun 2024 mencerminkan tren fluktuasi, hal ini tercermin dari turun naiknya saldo aset setiap bulannya sepanjang tahun 2024 yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional BPR. Saldo aset Desember 2024 sebesar Rp. 20.065.357,- ribu atau sekitar 102,53% dari target yang direncanakan, dimana target yang di rencanakan adalah sebesar Rp. 19.570.581,- ribu, begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sekitar 5,47%, total aset tahun sebelumnya sebesar Rp. 19.024.903,- ribu

Pertumbuhan aset BPR belum memberikan nilai positif terhadap aspek rentabilitas BPR, hal ini tercermin dari pencapaian komposisi rasio ROA, ROE dan BOPO masih dibawah target yang direncanakan, melemahnya ekspansi produk BPR memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja BPR. Lebih lengkap tentang perkembangan aset nampak pada gambar di bawah ini.



2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pengembangan SDM BPR

a. Penghimpunan Dana

Sampai dengan akhir tahun 2024 dana pihak ketiga yang berhasil di himpun BPR sebesar Rp. 11.169.365,- ribu, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 10,05%, saldo Dana Pihak Ketiga tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.149.086,- ribu. Apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, pencapaian target Dana Pihak Ketiga sekitar 105,84%, dimana target yang direncanakan adalah sebesar 10.553.020,- ribu. Penghimpunan dana tersebut bersumber dari simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito dan kewajiban segera. Berikut Kami informasikan dari masing-masing sumber dana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (tabungan) sebesar Rp. 1.387.415,- ribu, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 12,86%, namun apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (tabungan) tidak terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 93,48%, suku bunga tabungan sampai dengan akhir 2024 sebesar 1,00%, sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP : 01/DIR/TAB/XII/2020 Tentang Ketentuan Umum Tabungan, berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020.

- 2) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui deposito berjangka sebesar Rp. 9.061.000,- Ribu, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 9,17%, demikian juga apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (deposito) terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 108,38 %, suku bunga yang diberikan BPR adalah bunga counter rate, selama tahun berjalan telah mengalami beberapa perubahan tingkat suku bunga, bunga terakhir berkisar antara 3,00% sampai dengan 5,25%, jangka waktu penyimpanan terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, sesuai dengan keadaan pasar dan kebutuhan likuiditas bank, minimal penempatan Rp. 8 juta, atas permintaan nasabah penambahan suku bunga akan diberikan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Direksi PT BPR Nehemia No. SKEP : 01/BN/DIR/DEP/X/2024 Tentang Penetapan Suku Bunga Deposito, berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024.
- 3) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui Kewajiban Segera sebesar Rp. 720.950,- ribu, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 16,32%, apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, maka jumlah tersebut berada di atas target yang direncanakan, dengan pencapaian target sekitar 101,73%.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana BPR terdiri atas Penempatan Pada Bank Lain (PBL) dan Pinjaman yang Diberikan. Masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda namun memiliki risiko dan tujuan yang sama. Perkembangan dari masing-masing produk tersebut akan Kami informasikan sebagai berikut :

- 1) Penyaluran dana melalui penempatan pada bank lain sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 13.908.093,- ribu jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 3,55% dari tahun sebelumnya, demikian juga apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR,

penyaluran dana melalui penempatan pada bank lain terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 110,25%. Jumlah tersebut tersebar di beberapa Bank Umum dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas BPR masih terjaga dengan baik.

- 2) Outstanding kredit Gross BPR sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 7.911.058,- ribu jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 7,99%, hal ini disebabkan realisasi pinjaman yang diberikan lebih besar dari angsuran kredit yang diberikan, namun demikian masih dibawah target yang direncanakan, pencapaian target outstanding kredit BPR sekitar 90,52%. Target yang direncanakan sebesar 8.739.596,- ribu. Pertumbuhan BPR Nehemia masih melambat. Formula strategi dan kebijakan BPR telah disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagai acuan BPR dalam menjalankan usaha, tingkat kehati-hatian lebih diutamakan, faktor lain kurangnya kemampuan BPR untuk bersaing dikomunitas.

Dilihat dari target ekspansi kredit yang direncanakan BPR tahun 2024, maka pencapaian target Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp. 6.743.500,- ribu atau sekitar 93,66%, dengan rata-rata plafond sebesar Rp. 25.739,- ribu, jumlah tersebut meliputi pinjaman baru sebesar Rp. 1.539.000,- ribu dengan rata-rata plafond Rp. 42.750,- ribu, dan Roll Over (RO) sebesar Rp. 5.204.500,- ribu dengan rata-rata plafond Rp. 23.029,- ribu, dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa, penyaluran dana lebih dominan dalam bentuk Roll Over (RO) yakni sekitar 77,18%, sedangkan kredit baru sekitar 22,82%, adapun target yang direncanakan sebesar Rp. 7.200.000,- ribu terdiri atas dua jenis penggunaan kredit, yakni modal kerja sebesar Rp. 1.560.000,- ribu dan konsumtif sebesar Rp. 5.640.000,- dengan pencapaian target masing-masing sebesar 198,85% dan 64,57%.

c. Pengembangan SDM BPR

Kewajiban BPR menyediakan dan merealisasikan pengembangan kualitas SDM untuk mendukung peningkatan kompensasi kerja SDM yang

ditetapkan paling sedikit 5% dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, anggaran pelatihan dan pendidikan yang dicadangkan BPR sampai tahun 2024, masih dapat mengcover kebutuhan biaya dalam hal pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM BPR, dalam pelaksanaannya dilalukan baik dilingkungan intern BPR yang diikuti oleh seluruh pegawai BPR diluar staf umum, maupun yang diselenggarakan oleh pihak ekstern, baik secara online maupun offline, sesuai dengan kebutuhan BPR dalam rangka meningkatkan potensi karyawan, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan dan produktivitas usaha BPR.

3. Kondisi Keuangan Utama

a. Aspek Permodalan.

Sampai dengan akhir tahun 2024 Aspek permodalan apabila dilihat dari rasio CAR mencapai 123,18%, aspek ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 0,86%, dan melebihi target yang direncanakan sekitar 32,52%,. Jumlah rasio CAR tahun sebelumnya dan target yang direncanakan masing-masing sebesar 122,13% dan 90,66%. Kondisi tersebut menunjukkan likuiditas BPR terjaga.

b. Aspek Kualitas Aktiva

Aspek Kualitas Aktiva yang dimiliki BPR apabila dilihat dari rasio NPL gross mencapai 21,19 20,59 %, aspek ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 2,91% begitupun jika dilihat dari target yang direncanakan, prosentase tersebut masih diatas target yang direncanakan. Pencapaian prosentase NPL tahun lalu dan target BPR tahun 2024 masing-masing sebesar 20,59% dan 16,30%. Dalam hal ini NPL BPR masih tergolong tinggi, upaya penurunan NPL yang dilakukan BPR masih relatif kecil, belum memberikan hasil yang diharapkan.

c. Aspek Rentabilitas

Perolehan laba BPR sampai dengan akhir tahun 2024 dilihat dari komposisi rasio rentabilitas yang pengukurannya melalui rasio ROA dan BOPO,

masing masing sebesar 0,16% dan 98,75%. adapun komponen rentabilitas tahun sebelumnya masing-masing sebesar 0,29% dan 97,80%, dengan demikian kedua rasio tersebut menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, Apabila dilihat dari target BPR, target yang direncanakan masing-masing sebesar 0,81% dan 94,02%, dengan demikian pencapaian target aspek rentabilitas yang direncanakan tidak terealisasi. Pencapaian target masing-masing rasio sekitar 88,89 % dan 95,21%. Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa kemampuan BPR dalam menghasilkan laba belum optimal.

d. Aspek Likuiditas

Aspek likuiditas yang dimiliki BPR sampai dengan akhir tahun 2024 yang pengukurannya dilihat dari Cash Rasio dan LDR, masing-masing mencapai 10,18% dan 41,79%, adapun komponen likuiditas tahun sebelumnya masing-masing sebesar 8,8% dan 40,74%, dengan demikian menunjukkan adanya peningkatan Cash Rasio sebesar 15,68 % dan rasio LDR sebesar 2,58%, apabila dilihat dari pencapaian target yang direncanakan BPR, maka pencapaian target aspek likuiditas masing-masing sebesar 101,90% dan 87,90% dari target BPR, dimana target yang direncanakan BPR masing-masing sebesar 9,99% dan 47,54%. Meningkatnya Cash Rasio, dikarenakan meningkatnya saldo pos penempatan pada bank Lain (PBL) dalam bentuk tabungan yang digunakan untuk ekspansi kredit. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan Loan To Deposit Ratio (LDR) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Realisasi Jangka Pendek (bulan) dan jangka Panjang (tahun)

Dalam merealisasikan rencana kerja BPR, manajemen telah melakukan langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut :

- a. Target aset akhir tahun 2024 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang terealisasi, dimana pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 100,79%, dari target BPR, berkisar antara 97,21% sampai dengan 104,82%, sedangkan jangka panjang mencapai 102,53% dari target BPR atau sebesar Rp. 20.065.357 ,- ribu.

- b. Target pembentukan cadangan sekunder dalam bentuk penempatan dana pada bank lain akhir tahun 2024 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek maupun jangka panjang terealisasi, dimana pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 103,71%, dari target BPR, berkisar antara 100,00% sampai dengan 110,51%, sedangkan jangka panjang mencapai 110,25% dari target BPR atau sebesar Rp. 13.908.093,- ribu.
- c. Target pinjaman yang diberikan akhir tahun 2024 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang masing-masing tidak terealisasi, dimana pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 96,78%, dari target BPR, berkisar antara 90,52% sampai dengan 100,00% sedangkan jangka panjang mencapai 90,52% dari target BPR atau sebesar Rp. 7.911.058,- ribu,
- d. Target penghimpunan dana pihak ke tiga akhir tahun 2024 dalam bentuk simpanan dan kewajiban segera, sementara pinjaman yang diterima saat ini tidak menjadi sumber target penghimpunan dana pihak ke tiga. Apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang atas simpanan dan kewajiban segera dapat Kami informasikan sebagai berikut :
 - 1) Simpanan terealisasi, tercermin dari pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 102,96%, dari target BPR, berkisar antara 100,00% sampai dengan 111,37%, sedangkan jangka panjang mencapai 106,14% dari target BPR atau sebesar Rp. 10.448.415,- ribu.
 - 2) Kewajiban segera, untuk pencapaian target dan jangka pendek sebagian tidak terealisasi, rata-rata sebesar 95,03%, dari target BPR, berkisar antara 84,52% sampai dengan 101,73%, sedangkan jangka panjang mencapai 101,73% dari target BPR atau sebesar Rp. 720.950,- ribu.

Kode Form	: Form A.04.00
Nama Form	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

I. Kebijakan Manajemen

Kebijakan manajemen dalam hal pengelolaan dan pengembangan operasional bank selama tahun 2024, yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pengembangan karyawan (SDM) BPR adalah sebagai berikut :

A. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi BPR tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana setiap bagian dari organisasi telah dilengkapi dengan deskripsi tugas kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kekosongan jabatan dalam stuktur organisasi, diantaranya Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan, manajemen risiko dan APU PPT belum dapat direalisasikan, begitu pula dengan Kepala Marketing dan marketing, hal ini tetap akan menjadi perhatian BPR dalam pemenuhannya terkait upaya BPR untuk meningkatkan pertumbuhan operasional BPR. Pejabat Eksekutif satuan Pengawas Internal (SPI) tahun sebelumnya telah terpenuhi kini mengalami kekosongan kembali pasca yang bersangkutan mengundurkan diri. (Bagan struktur organisasi terlampir).

B. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana BPR bersumber dari masyarakat dan bank lain dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) serta kewajiban segera, adapun pinjaman yang diterima saat ini tidak menjadi pangsa pasar DPK BPR. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2024, mencapai target yang di rencanakan dengan pencapaian target sebesar 105,84%, namun demikian BPR berupaya untuk terus meningkatkan penghimpunan dana pihak ke tiga guna meningkatkan aset BPR yang memberikan efek positif terhadap pengaturan likuiditas yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap penyaluran dana. Untuk jalannya

operasional, BPR Selalu mengevaluasi kembali pelaksanaan Prosedur dan kebijakan penghimpunan dana pihak ketiga, dan apabila diperlukan Direksi memberikan arahan kepada bagian terkait agar dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan aturan yang telah ditentukan. Secara umum penghimpunan dana pihak ke tiga dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Simpanan :

- a. Pemberian layanan terhadap deposan dan penabung telah mengikuti Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. BPR NEHEMIA.
- b. BPR mewajibkan pelaksanaan prosedur APU & PPT khusus bagi penyimpan dana di atas Rp. 100 juta tunai atau mencurigakan dan melaporkannya secara berkala kepada Otoritas Jasa keuangan
- c. Bunga atas simpanan pihak ke tiga seperti deposito berjangka dan tabungan telah sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada setiap laporannya, bunga tabungan sampai dengan akhir Desember 2023 sebesar 1 %, dimana bunga tabungan selalu di bawah bunga deposito berjangka dan bila terjadi perubahan tanpa memberitahukan penabung namun demikian perubahan tersebut selalu diumumkan dipapan pengumuman, adapun bunga Deposito berkisar antara 3,00 % sampai dengan 5,25 %, atas permintaan nasabah terhadap penambahan suku bunga deposito akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Kewajiban Segera

Merupakan sumber dana lainnya dari penghimpunan dana pihak ketiga BPR, yang sifatnya hanya sementara/titipan, karena pos ini merupakan kewajiban BPR yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera di bayar.

C. Penyaluran dana

1. Pemberian layanan terhadap penyaluran dana selalu mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di BPR NEHEMIA.

2. Dalam pemberian kredit, BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terutama yang berkaitan dengan pengendalian atas rasio Cash Rasio (CR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Loan to Deposit Rasio (LDR) yang besarnya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian kredit dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank, mulai dari pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan kredit, sampai kredit lunas. Dalam hal ini prinsip tepat waktu dan tepat jumlah menjadi acuan kerja BPR guna menjaga kualitas aktiva produktif BPR
4. Upaya pemantauan jalannya operasional, BPR selalu mengevaluasi kembali pelaksanaan Prosedur dan kebijakan penyaluran dana dan operasional administrasi kredit.

D. Pengembangan karyawan (SDM)

Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti di dunia ini, termasuk dalam dunia bisnis, tidak semua cara lama kini dapat dipakai. Untuk itu BPR mengantisipasi perubahan melalui pengembangan karyawan yang terus dinamis sesuai dengan kebiasaan dan kondisi terkini, sehingga bukan hanya membantu karyawan menyadari perubahan disekelilingnya, namun juga mendorong karyawan untuk berkontribusi aktif memberikan inovasi pada perusahaan dalam menghadapi perubahan, tujuan lain adalah agar setiap karyawan tidak terjebak rutinitas dan dapat berkontribusi aktif memajukan perusahaan. di era pascapandemi yang dampaknya masih memberikan pengaruh pada perkembangan usaha BPR.

Pengembangan karyawan dilakukan melalui kegiatan yang bersifat rutin, seperti pemenuhan kebutuhan karyawan, pendidikan dan pelatihan, melakukan pengkajian organisasi, pengelolaan komunikasi pegawai, pengelolaan gaji dan tunjangan serta kesejahteraan pegawai, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pertumbuhan usaha BPR.

E. Kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Dalam hal kerjasama antar bank atau lembaga lain yang dilakukan BPR adalah dalam bentuk :

1. Penempatan pada bank lain (PBL)
Merupakan penempatan sementara dana bank berupa tabungan, deposito berjangka dan giro, agar dana tetap produktif sebelum digunakan untuk pengembangan operasional BPR.
2. Pelayanan kepada nasabah BPR
Merupakan upaya BPR untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah BPR dalam bertransaksi.
3. Pinjaman yang diterima dari bank lain
Fasilitas ini merupakan komponen dari penghimpunan dana pihak ke tiga BPR, akan tetapi saat ini BPR tidak menggunakannya mengingat likuiditas BPR masih dapat memenuhi kebutuhan perkembangan operasional BPR.
4. Kerjasama dengan lembaga lain
Sampai dengan akhir tahun 2024 kerjasama BPR dengan salah satu Dealer Motor Honda Amarta Sayap Merah (Amarta motor) yang berkedudukan di Jl. Moch Roha No. 136 Bandung, dimana BPR sebagai pemberin pinjaman dengan jaminan kendataan menggunakan pola perikatan guna kepemilikan kendaraan bermotor.

F. Jaringan kerja dan mitra usaha

Sampai dengan akhir tahun 2024, selain dengan salah satu Dealer Motor Honda Amarta Sayap Merah (Amarta motor), BPR belum melakukan penambahan mitra usaha atau wilayah kerja yang baru, hal ini dimaksudkan agar BPR dapat mengoptimalkan pengembangan dan monitoring usaha di wilayah kerja bank yang sudah ada. wilayah kerja PT. BPR Nehemia meliputi wilayah kab. Bandung barat, Kab. Bandung, Cimahi, Cianjur, Purwakarta, sukabumi dan sekitar perbatasan wilayah Kabupaten, adapun mitra usaha PT. BPR NEHEMIA terdiri atas pegawai baik swasta maupun pemerintah dan umum.

G. Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus dan antar Pemilik dengan Pengurus BPR

Sebagaimana telah diuraikan dalam Akta Notaris pada bab sebelumnya, perihal kepemilikan dan susunan pengurus, dapat Kami informasikan sebagai berikut :

1. Pemilik saham BPR satu sama lain memiliki hubungan keluarga.
2. Pengurus BPR satu sama lain tidak ada keterkaitan keluarga.
3. Direktur Utama BPR merupakan salah satu Pemilik Saham BPR.

H. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam RUPS BPR telah diatur mengenai prosedur penetapan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan penetapan dan besaran remunerasi bagi Direksi diputuskan oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, kewenangan ini telah dituangkan dalam Risalah Rapat Pemegang Saham BPR.

I. Transaksi yang berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional BPR, dalam pelaksanaannya BPR melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, baik pihak ketiga lainnya maupun pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa, perlakuan atas kerjasama tersebut diberlakukan sama, dimana BPR selalu melakukan pembandingan untuk menetapkan biaya atas setiap transaksi yang akan dilakukan. disamping itu untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR, khususnya transaksi yang memiliki hubungan istimewa, maka pihak yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut mengambil keputusan. Sesuai dengan ketentuan yang atur dalam Good Corporate Governance (GCG)

J. Kebijakan Akuntansi BPR

1. Kebijakan Akuntansi BPR berpedoman pada SAK-ETAP (standar akuntansi keuangan - entitas tanpa akuntabilitas publik) tentang akuntansi perbankan dan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku umum.
2. Laporan BPR sudah mengacu pada SAK-ETAP, dimana dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

K. Reklasifikasi pos laporan keuangan

BPR tidak melakukan proses reklasifikasi pada pos laporan keuangan, adapun jika terjadi kesalahan akun transaksi maka dilakukan ayat jurnal penyesuaian atau koreksi antar pos dalam laporan keuangan.

L. Pengelolaan dan pengembangan operasional bank

1. BPR akan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu pengelolaan dan pengembangan SDM. Sistem operasional BPR yang digunakan merupakan implementasi core banking system, yang mana dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.
2. Penyediaan aktiva tetap sebagai sarana pendukung operasional dilakukan melalui operating leasing (sewa).
3. Implementasi penghimpunan dan penyaluran dana, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan hasil produk yang dimiliki BPR, akan tetapi penurunan ekspansi produk BPR masih dirasakan sampai saat ini. Berikut langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk memperlancar aktivitas operasional dalam memasarkan dan menghasilkan produk antara lain :
 - a. Segmentasi pasar khususnya menengah ke bawah, dengan target lokasi pertokoan, perumahan, pabrik-pabrik, instansi-instansi yang berada di wilayah kerja BPR.
 - b. Penetapan besaran suku bunga kredit sesuai dengan harga pasar, sedangkan untuk suku bunga simpanan sesuai dengan likuiditas bank.

- c. Layanan yang diberikan untuk menerima setoran/angsuran kredit, penyetoran deposito dan tabungan dapat dilakukan melalui counter BPR langsung atau rekening BPR yang ada di bank umum, sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan melalui counter BPR langsung.
- d. Promosi produk telah dilakukan melalui penyebaran brosur dan konten-konten yang dimuat dalam berbagai platform media sosial secara sekaligus (WhatsApp, Instagram, facebook) dengan pilihan Keyword atau topik yang sesuai dengan situasi dan kondisi internal maupun eksternal, juga dilakukan melalui media personal selling (penjualan langsung/jemput bola), penyebaran brosur, masih tetap dilakukan, sedangkan media mass selling (harian umum media lokal) bersifat optional.
- e. Peningkatan kinerja, meliputi persiapan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, kekurangan modal, menanggulangi kerugian operasional dan lainnya, dilakukan BPR sesuai dengan rencana Bisnis BPR, antara lain :
 - 1) Persiapan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah diawali dengan penetapan kebijakan kredit yang tepat, selanjutnya dilakukan pengawasan kredit melalui monitoring dan evaluasi, meliputi :
 - a) On Desk Monitoring, merupakan pengawasan kredit yang dilakukan secara administratif, terhadap laporan-laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga.
 - b) On Site Monitoring, merupakan kegiatan pengawasan kredit yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada nasabah, hal ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring.
 - c) Auditing, merupakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat sesuai ketentuan.
 - 2) Dalam hal permodalan BPR masih dapat mengcover likuiditas BPR, dimana CAR BPR akhir tahun 2024 sebesar 123,18 %, modal

inti BPR sebesar Rp. 8.483.592,- ribu, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas.

- 3) Upaya BPR dalam hal menanggulangi kerugian operasional dilakukan dengan cara menjaga kondisi aktiva produktif BPR agar tetap tumbuh dan berkembang, serta menekan tingkat NPL agar tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, upaya tersebut dapat dilakukan BPR tercermin dari adanya peningkatan outstanding kredit BPR walaupun prosentase NPL meningkat dari tahun sebelumnya,
 - f. Pembukaan kantor cabang maupun kantor lain dibawah kantor cabang, belum menjadi rencana BPR, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan BPR dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya kemampuan BPR untuk bersaing di komunitas serta kesediaan SDM dan Sistem Informasi BPR.
4. Dana operasional BPR, diperoleh dari beberapa sumber, antara lain :
 - a. Laba ditahan.
 - b. Laba tahun berjalan
 - c. Cadangan umum
 - d. Dana pihak ke tiga (tabungan, deposito berjangka dan kewajiban segera).
5. Penggunaan dana secara berurutan dipergunakan untuk :
 - a. Ekspansi kredit.
 - b. Pemenuhan kewajiban yang telah jatuh tempo.
 - c. Penempatan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan, Deposito maupun giro.
6. Rencana Bisnis BPR yang telah disusun oleh manajemen menjadi alat pengendali setiap akhir bulan atau tindakan operasional oleh Dewan Direksi.
7. Rencana Bisnis BPR yang telah disusun oleh manajemen dievaluasi tingkat deviasinya antara rencana dengan realisasi oleh Dewan direksi dan dewan Komisaris.
8. Tindak lanjut hasil temuan OJK tahun 2024, sesuai dengan komitmen, Pola penyelesaian atas tindak lanjut hasil temuan OJK dilakukan dengan cara mendistribusikan ke setiap bagian terkait hasil temuan, selanjutnya

dilakukan pengontrolan sehingga penyampaian hasil tindak lanjut temuan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen, dan apabila ada kendala segera dicari solusinya.

Pemenuhan tindak lanjut hasil temuan OJK sebagian besar telah diselesaikan, adapun hasil temuan pemeriksaan umum OJK, yang belum dapat ditindak lanjuti segera akan tindak lanjuti dan hasilnya disampaikan kepada OJK.

II. Strategi Manajemen

Mengacu pada rencana bisnis BPR, langkah-langkah penerapan strategi manajemen BPR Bertolak dari visi dan misi BPR yang merupakan pandangan strategis dalam pencapaian jangka panjang dan global, maka sesuai dengan rencana strategis yang di dasarkan pada hasil analisis SWOT bahwa tingkat efektivitas yang dilakukan manajemen BPR sebagai berikut :

A. Strength (Kekuatan) dengan Opportunity (peluang)

1. Penghimpunan Dana

- a. Memperluas segmentasi pasar depositan dan penabung, di wilayah kerja BPR.
- b. Membina pola kerjasama yang sudah terjalin dengan berbagai instansi baik swasta maupun Pemerintah serta pemuka masyarakat untuk tetap menjadi mitra penyimpan dana
- c. Selalu melakukan penyesuaian tingkat bunga deposito dan tabungan dengan pesaing, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan LPS.
- d. Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi funding sehingga BPR lebih dikenal masyarakat pengguna jasa perbankan. Saat ini dilakukan BPT melalui media sosial yang dimiliki.
- f. Melakukan evaluasi atas produk Funding yang dipasarkan, menyangkut produk, harga, tempat maupun promosi.

2. Penyaluran dana

- a. Inovasi produk kredit untuk meningkatkan minat pengguna jasa perbankan, dalam upaya meningkatkan ekspansi kredit.
- b. Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik swasta maupun negeri serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra peminjam dana.
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi produk lending sehingga BPR lebih dikenal masyarakat pengguna jasa perbankan.
- d. Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
- e. Melakukan evaluasi atas produk lending yang dipasarkan, menyangkut produk, harga, tempat maupun promosi.

3. Pengembangan Karyawan (SDM)

- a. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga bagian yang terkait mampu meningkatkan wawasan/pengetahuannya.
- b. Perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan di bagian-bagian yang memerlukan penambahan karyawan.
- c. Melakukan pengembangan organisasi pemasaran dalam hal ini mediator yang berkaitan dengan pencapaian target lending belum sepenuhnya dapat dilakukan.

B. Strength (Kekuatan) dengan Threat (ancaman)

1. Penghimpunan dana

- a. Telah melakukan penyesuaian tingkat suku bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing, namun tetap sesuai dengan ketentuan penjaminan dari LPS.
- b. Promosi produk funding melalui media promosi penjualan antara lain Media Sosial Instagram dan WhatsApp serta penyebaran brosur.

2. Penyaluran dana

- a. Telah dilakukan evaluasi persyaratan kredit sehingga lebih cepat, tepat dan akurat.

- b. Melakukan pengembangan dan evaluasi jenis produk kredit melalui modifikasi produk yang telah dimiliki BPR sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Memperbaiki dan mereview persyaratan dan prosedur pemberian kredit yang dapat menghambat pelayanan.
- d. Peningkatan promosi produk lending, melalui media promosi produk penjualan antara lain : Media Sosial Instagram dan WhatsApp serta penyebaran brosur dan jemput bola dengan berbagai manfaat dan jenis kredit yang disalurkan BPR.

3. Pengembangan kompetensi karyawan

- a. Untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, kreatifitas dan produktifitas SDM, BPR mengadakan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk pegawai maupun pengurus, yang mana lembaga penyelenggara bersumber dari pihak intern maupun ekstern, sesuai dengan kebutuhan BPR, kegiatan yang melibatkan pihak eksteran diselenggarakan oleh lembaga pelatihan dan pendidikan serta pengembangan SDM baik secara online melalui webinar dan talkshow maupun offline.
- b. Penyesuaian gaji atau tunjangan karyawan yang diberikan kepada para pegawai minimal di atas Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) KBB tahun 2024.
- c. Memberikan sarana dan prasana memperbaiki dan mereview persyaratan dan prosedur penghimpunan maupun penyaluran dana yang dapat memperlambat proses pelayanan.

C. Weakness (kelemahan) dengan Opportunity (peluang)

1. Penghimpunan dana

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat penyimpan dana, sehingga ada keseimbangan antara nasabah dengan deposan, tidak terfokus hanya pada bunga deposito yang tinggi, kondisi simpanan BPR menunjukan bahwa jumlah nominal deposito lebih besar dari jumlah nominal tabungan akan tetapi jumlah rekening penabung lebih besar dari jumlah rekening deposan.

- b. Melakukan pengembangan tabungan dan deposito.
- c. Melakukan promosi simpanan melalui promosi penjualan antara lain : Media Sosial serta penyebaran brosur.
- d. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyaluran dana

- a. Melakukan pengevaluasian dan perbaikan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta persyaratannya.
- b. Melakukan pengembangan organisasi pemasaran yang berkaitan dengan pencapaian target lending yang sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan sebagian besar atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

3. Pengembangan karyawan

- a. Melakukan perekrutan tenaga *Back Office* dan *Teller*, serta mutasi karyawan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja yang disebabkan pengunduran diri karyawan.
- b. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Weakness (kelemahan) dengan Threat (ancaman)

- 1. Menambah karyawan sesuai kebutuhan dan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan
- 2. Belum terealisasi pemenuhan kekurangan struktur organisasi BPR secara keseluruhan.
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan yang lebih unggul dari pesaing.
- 4. Memperbaharui dan memperbaiki persyaratan kredit dan prosedur pemberian kredit yang dapat memperlambat pelayanan dan mempercepat proses pemberian kredit

III. Manajemen Risiko

Identifikasi dan pengendalian risiko sebagaimana telah di atur dalam POJK No. 13/POJK/03/2015 telah memacu kesadaran BPR akan perlunya manajemen risiko. Dengan adanya Empat Pilar Manajemen Risiko yakni pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, dapat dijadikan sebagai acuan BPR dalam pengambilan langkah-langkah pengendalian risiko. Melihat dari Modal Inti yang dimiliki BPR sampai dengan akhir tahun 2024, Sedikitnya ada 4 jenis risiko yang mendapat perhatian khusus BPR sebagaimana di atur dalam POJK No. 3/POJK.03/2022 tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Likuiditas

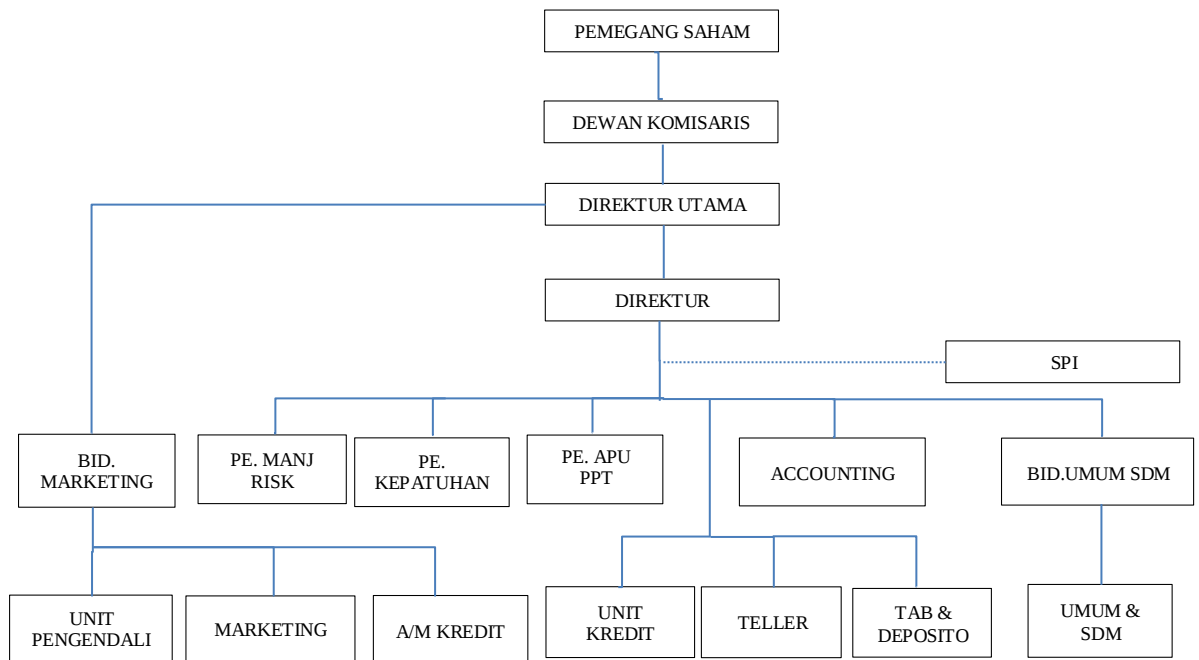
Penerapan dasar yang dilakukan manajemen di lingkungan intern BPR dalam menyikapi hal tersebut di atas, yaitu dengan memberikan arahan-arahan rutinitas kepada seluruh bagian khususnya bagian lending dan funding yang bertujuan untuk memacu motivasi dan evaluasi kerja serta kendala yang dihadapi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko yang akan dihadapi oleh setiap bagian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, untuk menjaga kelangsungan hidup BPR, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian risiko antara lain:

1. Menekan biaya investasi dan operasional
2. Menghindari risiko yang tidak terkendali
3. Menghilangkan pemborosan
4. Meraih dan meningkatkan peluang
5. Meningkatkan share holder bank.

Kode Form	: Form A.05.01
Nama Form	: STRUKTUR ORGANISASI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Struktur Organisasi
BPR Nehemia



Kode Form	: Form A.05.02
Nama Form	: BIDANG USAHA
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan	Tabungan Harian
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Deposito	Deposito Berjangka, dengan pilihan jangka waktu bervariasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan
Penyaluran Dana	Produk Dasar	Kredit	Kredit dengan jenis penggunaan modal kerja, konsumtif atau investasi

Kode Form	: Form A.05.03
Nama Form	: TEKNOLOGI INFORMASI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Selama tahun 2024, Sistem Informasi / CBS (Core Banking System) BPR masih menggunakan MIBAS (Micro Integrated Banking Sistem) yang dikembangkan oleh Penyedia Jasa Teknologi POLARIS, BPR juga masih menggunakan aplikasi ANSEL untuk bagian-bagian tertentu.

CBS yang dipakai belum sempurna (MIBAS) masih dalam pengembangan. Dalam Rencana Bisnis, BPR belum berencana melakukan penyempurnaan teknologi Informasi yang dimiliki, namun BPR tetap berupaya agar teknologi yang dimiliki saat ini di optimalkan penggunaannya.

Untuk keamanan Sistem Informasi, setiap karyawan yang berhubungan dengan data Bank memiliki username dan passwordnya masing-masing. Setiap bagian mempunyai porsi menu yang berbeda-beda tergantung jobdesk nya. Untuk mitigasi Risiko, terdapat Otorisasi berjenjang yang berkaitan dengan limit transaksi di setiap bagian.

Kode Form	: Form A.05.04
Nama Form	: PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Perkembangan dan target pasar PT. BPR NEHEMIA menitik beratkan pada kemampuan bank dalam menjaga likuiditas yang cukup, agar bank tetap dapat berkembang serta dapat memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut Kami informasikan data perkembangan dan target pasar tahun 2024 antara lain :

A. Penghimpunan Dana

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BPR yakni dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan kewajiban segera. Target penghimpunan dana pihak ke tiga sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp 10.553.020,- ribu, adapun target yang tercapai adalah sebesar Rp. 11.169.365,- ribu atau sekitar 105,84%, begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sekitar 10,05 %. Hal ini disebabkan adanya peningkatan simpanan beku dari ekspansi kredit.

Lebih lengkapnya berikut kami informasikan kondisi penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir Desember 2024 pada table di bawah ini.

PT. BPR NEHEMIA
TARGET DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KE TIGA
PERIODE DESEMBER 2024
(dalam ribuan rupiah)

JENIS SUMBER DANA	31-Des-23	RENCANA dan REALISASI			
		RENCANA		REALISASI	
		IDR	GROWT %	IDR	GROWT %
Total Simpanan	9.529.304	9.844.332	103,31%	10.448.415	106,14%
Tabungan	1.229.304	1.484.232	120,74%	1.387.415	93,48%
Deposito	8.300.000	8.360.100	100,72%	9.061.000	108,38%
Total Pinjaman yang diterima	0	0	0,00%	0	0,00%
Pinjaman yang diterima	0	0	0,00%	0	0,00%
Total Kewajiban Segera	619.781	708.688	114,34%	720.950	101,73%
Kewajiban Segera	619.781	708.688	114,34%	720.950	101,73%
Jumlah	10.149.085	10.553.020	103,98%	11.169.365	105,84%

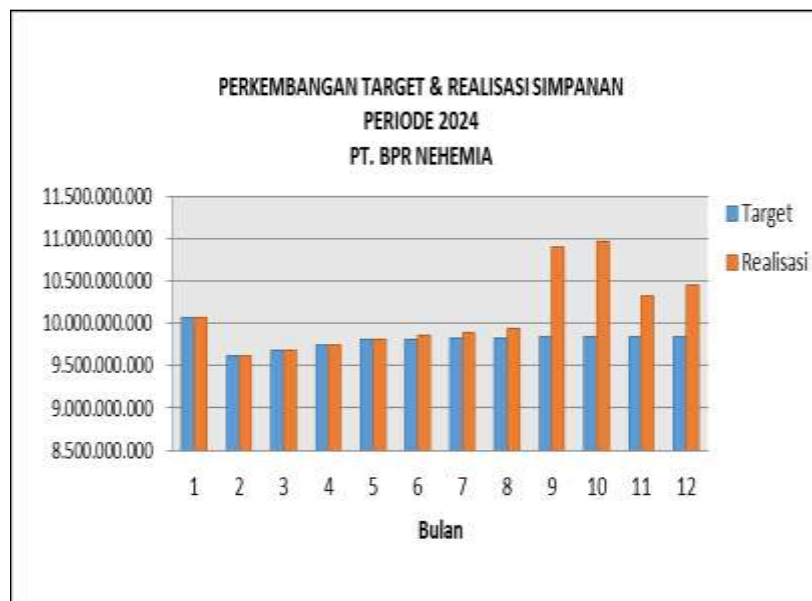
* 31 Desember 2023 merupakan tahun dasar

Berikut Kami informasikan perkembangan masing-masing sumber dana pihak ketiga yang dapat BPR himpun selama periode 2024 secara lebih terperinci antara target dan realisasi antara lain :

1. Simpanan

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BPR yakni dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 10.448.415,- ribu terdiri atas tabungan sebesar Rp. 1.387.415,- dan deposito berjangka sebesar Rp. 9.061.000,- ribu, jumlah tersebut berada di atas target yang direncanakan, dimana pencapaian target sebesar 106,14 %, sementara target yang direncanakan sebesar Rp. 9.844.332,- terdiri atas tabungan sebesar Rp. 1.484.232,- dan deposito berjangka sebesar Rp. 8.360.100,- ribu. Begitupun Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,65 %

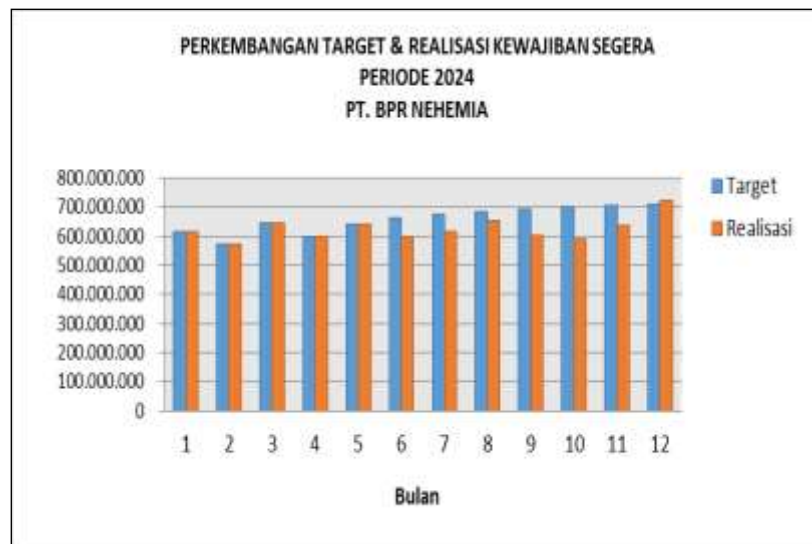
Lebih lengkap tentang perkembangan simpanan nampak pada gambar di bawah ini.



2. Kewajiban Segera

Penghimpunan dana pihak ketiga melalui Kewajiban Segera sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 720.950,- ribu, jumlah tersebut berada di atas target yang direncanakan, dimana pencapaian target sebesar 101,73% dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 708.688,- ribu akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat meningkat sebesar 16,32 %, saldo Kewajiban Segera tahun sebelumnya sebesar Rp. 708.688,- ribu.

Lebih lengkap tentang perkembangan kewajiban segera nampak pada gambar di bawah ini.



B. Penyaluran Dana

Melihat kondisi perkembangan usaha yang mengalami pelambatan, dimana perkembangan ekspansi kredit terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya, maka untuk mengantisipasi agar BPR tidak mengalami idle money, BPR menempatkan kelebihan dananya dalam pos Penempatan Pada Bank Lain (PBL). Hal dimaksudkan agar aset BPR tetap produktif.

Lebih lengkap kondisi penyaluran dana BPR nampak pada table di bawah ini.

PT. BPR NEHEMIA
TARGET DAN RELISASI PENYALURAN DANA
PERIODE DESEMBER 2024
(dalam ribuan rupiah)

Rp. 000

PENYALURAN DANA	31-Des-23	RENCANA dan REALISASI			
		RENCANA		REALISASI	
		IDR	GROWT %	IDR	GROWT %
1. Penempatan pada Bank Lain	13.431.662	12.615.086	93,92	13.908.093	110,25
a. Tabungan dan Deposito	13.374.866	12.578.620	94,05	13.823.915	109,90
b. Giro	56.796	36.466	64,21	84.178	230,84
2. Kredit yang Disalurkan	7.325.639	8.739.599	119,30	7.911.058	90,52
a. Kredit Modal Kerja	2.958.900	4.030.975	136,23	3.618.998	89,78
b. Kredit Konsumtif	4.366.739	4.708.624	107,83	4.292.060	91,15
c. Kredit Investasi	-	-	-	-	-
Jumlah	20.757.301	21.354.685	102,88	21.819.151	102,18

* 31 Desember 2023 merupakan tahun dasar

Selanjutnya perkembangan dari masing-masing penyaluran dana pihak ketiga selama periode 2023 dapat Kami informasikan sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana PBL

Penyaluran dana berupa penempatan dana pada bank lain (PBL) sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 13.908.093,- ribu jumlah tersebut berada di atas target yang direncanakan, dengan pencapaian target sekitar 110,25 %, adapun target yang direncanakan sebesar Rp. 12.615.086,- ribu begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar 3,55 %, saldo penempatan dana pada bank lain (PBL) tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.431.662, jumlah tersebut tersebar di beberapa Bank Umum dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas BPR masih terjaga dengan baik.

Lebih lengkap tentang penyaluran dana PBL, nampak pada gambar di bawah ini.



2. Penyaluran Dana Kredit

Penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 7.325.639,- ribu jumlah tersebut berada di bawah target yang direncanakan, dengan pencapaian target sekitar 90,19 %, dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 8.122.113,- ribu. Akan tetapi jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 5,5 %, saldo pinjaman yang diberikan tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.943.789, ribu, Kondisi menunjukkan adanya peningkatan usaha BPR yang selama ini secara terus menerus mengalami penurunan. Diharapkan kedepan ekspansi kredit dapat terus tumbuh dan berkembang.

Lebih lengkap tentang penyaluran dana kredit, nampak pada gambar di bawah ini.



3. Klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu

a. Pinjaman Yang Diberikan

Mengacu pada laporan aktiva produktif akhir tahun 2024, atas Pinjaman yang diberikan, maka berikut kami informasikan jumlah rekening yang dibiayai BPR atas pinjaman yang diberikan apabila dilihat jangka waktu kredit, yang akan Kami sajikan dalam tabel di bawah ini :

PT. BPR NEHEMIA
KLASIFIKASI PINJAMAN YANG DIBERIKAN
PERIODE DESEMBER 2023
(dalam ribuan rupiah)

JANGKA WAKTU	JUMLAH REKENING	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF
3	12	36.000
6	3	12.667
9	1	15.555
10	1	1.200
12	55	3.003.495
18	50	436.324
24	157	2.231.642
29	1	24.497
30	2	29.499
35	1	34.680
36	40	847.265
42	1	14.285
48	8	147.496
60	46	585.333
72	4	84.578
78	1	6.088
84	25	400.454
TOTAL	408	7.911.058

b. Penempatan dana Pada Bank Lain

Mengacu pada laporan aktiva produktif akhir tahun 2024, atas penempatan dana pada bank lain (PBL), maka perlu kami informasikan bahwa Penempatan dana pada Bank Lain yang dimiliki BPR tersebar di beberapa bank umum, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka, untuk lebih jelasnya informasi tersebut dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

KLASIFIKASI PENEMPATAN PADA BANK LAIN (PBL)
PERIODE DESEMBER 2024
(dalam ribuan rupiah)

JENIS BANK	SANDI BANK	JENIS PBL	KUALITAS	JUMLAH
700	014	10	1	84.178
700	014	20	1	436.239
700	028	20	1	212.989
700	013	20	1	114.611
700	008	20	1	174.617
700	110	20	1	65.456
700	002	20	1	20.003
700	013	30	1	10.800.000
700	137	30	1	2.000.000
JUMLAH				13.908.093

Kode Form	: Form A.05.05
Nama Form	: JUMLAH, JENIS DAN LOKASI KANTOR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan
				Nama Jalan dan No.	Desa/ Kecamatan	Kab./ Kota	Kode Pos	
1	001	Kantor Pusat	-6.842844,107.485456	Jl. Raya Padalarang No. 546	Kertamulia	0122 (Kab. Bandung Barat)	40553	Edrianto Sitorus

No. Telp	Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung
	Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap							
	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya		
(022) 6809121	0	1	2	1	3	1	0	0	3	0	3	0	0	Sewa

Jumlah Kas Keliling	Jumlah EDC			ATM		
	EDC Milik Sendiri	EDC milik BU	EDC Milik BPR Lain	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR
0	0	1	0	0	0	Tidak Ada

Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan					Jumlah Pegawai					
Keterangan Data Kantor	Surat Persetujuan		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
	No.	Tanggal			Pemasaran	Pelayanan	Lainnya	Pemasaran	Pelayanan	Lainnya
Tidak berubah	-	-	-	-	1	1	6	0	2	4

Jumlah Pegawai						
Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Usia				
Laki-Laki	Perempuan	<25	>25-35	>35-45	>45-55	>55
7	7	3	2	3	4	2

Jenis	Kode Kantor	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Sebelumnya	Nama Kantor	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan

No. Telepon	Keterangan Data Kantor	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan

Kode Form	: Form A.05.06
Nama Form	: KERJASAMA BPR DENGAN BANK, LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) LAIN, ATAU LEMBAGA LAIN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Sandi Bank / NPWP	Jenis Kerjasama	Uraian Kerjasama	Tanggal Mulai kerjasama
PT. Amarta Sayap Merah	033326646421000	Pembiayaan Produk Kenadraan Motor Honda	Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan berbagai type terhadap Nasabah sesuai permintaan	07/02/2024
PT. Asuransi Simas Jiwa	016904633062000	Penutupan Asuransi Jiwa Kredit	Perlindungan kepentingan BPR selaku pemberi pinjaman kepada nasabah dimana pihak asuransi akan membayarkan manfaat asuransi bagi BPR jika terjadi risiko yang dipertanggungkan	12/09/2022
PT. Asuransi Sinar Mas	013911490025000	Referensi Asuransi Kerugian dalam rangka produk Bank (Bancassurance)	Referensi Asuransi Kerugian dalam rangka produk Bank (Bancassurance)	21/06/2022
PT. Cakrabuana Insurance Brokers	828252429453000	Keperantaraan Penutupan Asuransi Kredit	Kerjasama keperantaraan Penutupan Asuransi Kredit	22/08/2022

Selama tahun 2024 BPR NEHEMIA tidak bekerjasama dengan BPR atau Bank Umum lainnya.

Kode Form	: Form A.05.07.1
Nama Form	: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – BIDANG TUGAS DAN KOMPOSISI PEGAWAI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Komposisi Pegawai	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	1
2. Pelayanan	3
3. Lainnya	10
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	8
2. Pegawai Tidak Tetap	6
Tingkat Pendidikan	
1. S3	0
2. S2	1
3. S1/D4	5
4. D3	1
5. SMA	6
6. Lainnya	1
Jenis Kelamin	
1. Laki-Laki	7
2. Perempuan	7
Usia	
1. Usia ≤ 25 tahun	3
2. Usia > 25 – 35 tahun	2
3. Usia > 35 – 45 tahun	3
4. Usia > 45 – 55 tahun	4
5. Usia > 55 tahun	2

Kode Form	: Form A.05.07.2
Nama Form	: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	03/01/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	GCG
Pelatihan	11/01/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	GCG
Pelatihan	12/01/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Webinar Perhitungan dan Manajemen PPh Pasal 21 Untuk BPR
Pelatihan	13/01/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	GCG
Pelatihan	17/01/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	GCG
Pelatihan	24/01/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	GCG
Pelatihan	26/01/2024	Eksternal BPR	Direksi	1	Sosialisasi POJK No. 20 Tahun 2023 tentang produk Asuransi
Pelatihan	07/02/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	12	Manajemen Risiko
Pelatihan	17/02/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	12	Manajemen Risiko
Pelatihan	20/02/2024	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	1	Coaching Penyusunan Dokumen penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM secara Individual (Individual Risk Assesment/IRA) oleh PJK
Pelatihan	21/02/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	13	Manajemen Risiko
Pelatihan	27/02/2024	Eksternal BPR	Direksi	1	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU Tahun 2024
Pelatihan	28/02/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	14	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Kaitannya dengan TPPU Tahun 2024
Pelatihan	28/02/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	14	Deteksi & Pencegahan Kecurangan
Pelatihan	06/03/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	13	Deteksi & Pencegahan Kecurangan
Pelatihan	06/03/2024	Eksternal BPR	Direksi	1	Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Barat Serta Seminar Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024
Pelatihan	13/03/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	13	Deteksi & Pencegahan Kecurangan
Pelatihan	16/03/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	12	Deteksi & Pencegahan Kecurangan
Pelatihan	20/03/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	12	Deteksi & Pencegahan Kecurangan

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	27/03/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Fungsi dan Proses Penyidikan Tindak Pidana di OJK
Pelatihan	03/04/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Audit Internal
Pelatihan	17/04/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Audit Internal
Pelatihan	20/04/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Audit Internal
Pelatihan	23/04/2024	Eksternal BPR	Direksi	1	Silaturahmi dan Sinergi " Momentum Idul Fitri 1445H untuk memperkuat Sinergi Sektor Ekonomi dan Keuangan Jawa Barat"
Pelatihan	24/04/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Audit Internal
Pelatihan	24/04/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Undangan Kegiatan Silaturahmi 1445 H dan berbagi bersama anak Yatim
Pelatihan	17/05/2024	Eksternal BPR	Direksi	1	Pertemuan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan dan Sosialisasi POJK Terkini
Pelatihan	08/05/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Audit OJK
Pelatihan	15/05/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Audit OJK
Pelatihan	18/05/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Audit OJK
Pelatihan	22/05/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	APU PPT
Pelatihan	29/05/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Pahami & Hindari Tindak Pidana Perbankan
Pelatihan	31/05/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Pengujian Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur SLIK yang akan Beroperasi pada Sever Baru
Pelatihan	04/06/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan
Pelatihan	05/06/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pelaporan
Pelatihan	05/06/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Peningkatan Kredit
Pelatihan	12/06/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Pahami & Hindari Tindak Pidana Perbankan
Pelatihan	15/06/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Pahami & Hindari Tindak Pidana Perbankan
Pelatihan	19/06/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Fungsi dan Proses Penyidikan Tindak Pidana di OJK
Pelatihan	25/06/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Pelaporan Rencana dan realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Pelatihan	26/06/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Peningkatan Kredit
Pelatihan	02/07/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR dan Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Wawancara Dewan Pengawas Syariah BPRS

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	03/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peningkatan Kredit
Pelatihan	10/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Peningkatan Kredit
Pelatihan	10/07/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Ketentuan Standar Akitansi keuangan Entitas privat (SAK EP) kepada Pegawai teknis BPR
Pelatihan	16/07/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Pelaporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) emlalui SiPEDULI
Pelatihan	17/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Regulasi Perlindungan Konsumen
Pelatihan	20/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Regulasi Perlindungan Konsumen
Pelatihan	24/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Regulasi Perlindungan Konsumen
Pelatihan	24/07/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Edukasi Penyampaian Laporan Informasi Keuangan LJK, LJK Lainnya dan Entitas Lainnya (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI)
Pelatihan	31/07/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Regulasi Perlindungan Konsumen
Pelatihan	07/08/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Service Excellent
Pelatihan	14/08/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Fokus Pelayanan Cepat, Akuran & Efisien
Pelatihan	17/08/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Fokus Pelayanan Cepat, Akuran & Efisien
Pelatihan	21/08/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Fokus Pelayanan Cepat, Akuran & Efisien
Pelatihan	22/08/2024	Eksternal BPR	Komisaris	1	Pelatihan Capacity Buliding 2024 Perbarindo Komisariat Bandung Raya
Pelatihan	23/08/2024	Eksternal BPR	Komisaris	1	Pelatihan Capacity Buliding 2024 Perbarindo Komisariat Bandung Raya
Pelatihan	24/08/2024	Eksternal BPR	Komisaris	1	Pelatihan Capacity Buliding 2024 Perbarindo Komisariat Bandung Raya
Pelatihan	25/08/2024	Eksternal BPR	Komisaris	1	Pelatihan Capacity Buliding 2024 Perbarindo Komisariat Bandung Raya
Pelatihan	28/08/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Penanganan dan Pencarian Calon Pelanggan
Pelatihan	29/08/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisasi dan Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2024
Pelatihan	04/09/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Strategi Pemasaran BPR
Pelatihan	11/09/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Strategi Pemasaran BPR
Pelatihan	18/09/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Strategi Pemasaran BPR
Pelatihan	19/09/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Implementasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi program GENCARKAN (Gerakan Nasinal Cerdas Keuangan)
Pelatihan	21/09/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Strategi Pemasaran BPR
Pelatihan	25/09/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Pemaparan Dampak Perubahan ketentuan terhadaps laporan Bulanan BPR

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	25/09/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Cara Menganalisa Kredit Modal Kerja
Pelatihan	02/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Cara Menganalisa Kredit Modal Kerja
Pelatihan	09/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Rencana Bisnis Bank
Pelatihan	12/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Rencana Bisnis Bank
Pelatihan	16/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Rencana Bisnis Bank
Pelatihan	17/10/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online JK (APOLO) modul Laporan Profesi Keuangan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik (AP/KAP)
Pelatihan	18/10/2024	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online JK (APOLO) modul Laporan Profesi Keuangan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik (AP/KAP)
Pelatihan	21/10/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisasi Penyempurnaan ketentuan SLIK (POJK dan SEOJK SLIK)
Pelatihan	23/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Rencana Bisnis Bank
Pelatihan	28/10/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisasi pelaporan Online OJK (APOLO)
Pelatihan	30/10/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Peningkatan Kredit
Pelatihan	06/11/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Rencana Bisnis Bank
Pelatihan	07/11/2024	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	2	Sosialisasi Permi Penjaminan LPS
Pelatihan	11/11/2024	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	2	Bimbingan Teknis terkait Jaminan Fidusia dengan Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha
Pelatihan	11/11/2024	Eksternal BPR	Pegawai	3	Perhitungan CKPN dan Permohonan Pengisian Link Modal Inti BPR dan BPRS
Pelatihan	13/11/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peran OJK terhadap Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Serta Masyarakat
Pelatihan	13/11/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisai Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Inidental dan Laporan Bulanan BPR/BPRS
Pelatihan	14/11/2024	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisai Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Inidental dan Laporan Bulanan BPR/BPRS
Pelatihan	16/11/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peran OJK terhadap Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Serta Masyarakat
Pelatihan	20/11/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Aspek Pidana Fidusia
Pelatihan	28/11/2024	Eksternal BPR	Pegawai	3	Sosialisasi Ketentuan BPR dan BPRS
Pelatihan	02/12/2024	Eksternal BPR	Pegawai	3	Sosialisasi Ketentuan BPR dan BPRS
Pelatihan	04/12/2024	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Peningkatan Kredit
Pelatihan	20241211	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peningkatan Kredit
Pelatihan	20241214	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peningkatan Kredit

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	20241217	Eksternal BPR	Pegawai	3	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) modul Laporan Tahunan BPR/BPRS dan Laporan Keuangan Publikasi BPr/BPRS
Pelatihan	20241218	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Peningkatan Kredit

Anggaran pelatihan dan pendidikan yang dicadangkan BPR sampai tahun 2024, masih dapat mengcover kebutuhan biaya dalam hal pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM BPR, untuk mengaplikasikan dana tersebut BPR telah mengikut sertakan karyawan dalam berbagai jenis pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi karyawan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan usaha BPR. Sampai dengan akhir desember 2024 pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak ekstern pada umumnya dilakukan secara daring maupun luring, sementara pelaksanaan internal dilakukan secara tatap muka yang diikuti oleh seluruh karyawan diluar staf umum.

Kode Form	: Form B.01.00
Nama Form	: LAPORAN POSISI KEUANGAN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Aset	Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
Kas dalam Rupiah	69.880.000	96.019.350
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	13.908.093.127	13.431.662.301
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	69.540.466	67.158.311
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	7.911.058.050	7.325.638.650
-/- Provisi yang belum diamortisasi	52.556.252	56.355.548
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.862.769.970	1.865.152.125
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	372.477.080	372.477.080
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	365.600.860	359.772.432
Aset Tidak Berwujud	36.100.000	36.100.000
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	36.099.994	36.099.994
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Aset Lainnya	153.766.218	146.994.477
TOTAL ASET	20.064.806.933	19.024.353.448

Liabilitas dan Ekuitas	Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	720.950.268	619.781.086
Simpanan		
a. Tabungan	1.387.414.913	1.229.304.444
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	9.061.000.000	8.300.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas lainnya	397.589.680	395.734.584
TOTAL LIABILITAS	11.566.954.861	10.544.820.114
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	7.000.000.000	7.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	403.000.000	403.000.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Laba Tahun lalu	6.066.331.328	6.022.560.434
b. Laba Tahun Berjalan	28.520.744	53.972.900
TOTAL EKUITAS	8.497.852.072	8.479.533.334
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.064.806.933	19.024.353.448

Kode Form	: Form B.02.00
Nama Form	: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Nama Rekening			Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
Pendapatan Operasional			2.515.298.100	2.544.519.840
1	Pendapatan Bunga			
	a	Bunga Kontraktual		
		i. Surat Berharga	0	0
		ii. Penempatan pada Bank Lain		
		Giro	69.541	31.729
		Tabungan	3.890.088	2.600.990
		Deposito	691.766.432	616.532.565
		Sertifikat Deposito	0	0
		iii. Kredit yang Diberikan		
		Kepada Bank Lain	0	0
		Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	1.690.535.700	1.793.325.537
	b	Provisi Kredit		
		i. Kepada Bank Lain	0	0
		ii. Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	87.417.296	97.024.599
	c	Biaya Transaksi -/-		
		i. Surat Berharga	0	0
		ii. Kredit yang Diberikan		
		Kepada Bank Lain	0	0
		Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
	d.	Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2	Pendapatan Lainnya			
	a	Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
	b	Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
	c	Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
	d	Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	1.693.500	0
	e	Pemulihan CKPN	0	0
	f	Dividen	0	0
	g	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
	h	Keuntungan penjualan AYDA	0	0
	i	Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0

Nama Rekening			Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
	j	Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
	k	Lainnya	39.925.543	35.004.420
Beban Operasional			2.483.781.396	2.488.377.357
1	Beban Bunga			
	a	Beban Bunga Kontraktual		
	i.	Tabungan	14.879.542	13.761.225
	ii.	Deposito	513.922.947	509.494.956
	iii.	Simpanan dari Bank Lain	0	0
	iv.	Pinjaman yang diterima		
		1) Dari Bank Indonesia	0	0
		2) Dari Bank Lain	0	0
		3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
		4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
	v.	Lainnya	0	0
	b	Biaya Transaksi		
	i.	Kepada Bank Lain	0	0
	ii.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2	Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		0	0
3	Beban Cadangan Kerugian Nilai			
	a.	Surat Berharga	0	0
	b.	Penempatan pada Bank Lain	0	0
	c.	Kredit yang Diberikan		
	i.	Kepada Bank Lain	0	0
	ii.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
	d	Penyertaan Modal	0	0
	e	Aset Keuangan Lainnya	0	0
4	Beban Pemasaran		1.422.880	1.006.065
5	Beban Penelitian dan Pengembangan		0	0
6	Beban Administrasi dan Umum			
	a	Beban Tenaga Kerja		
	i.	Gaji dan Upah	741.958.688	681.499.150
	ii.	Honorarium	142.161.428	143.270.856
	iii.	Lainnya	59.770.700	64.360.191
	b	Beban Pendidikan dan Pelatihan	53.997.500	49.653.314
	c	Beban Sewa		
	i.	Gedung Kantor	500.000.000	500.000.000
	ii.	Lainnya	186.000.000	190.800.000
	d	Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	5.828.428	11.910.887
	e	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0

Nama Rekening			Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
	f	Beban Premi Asuransi	70.249.706	64.153.806
	g	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	3.970.500	3.229.500
	h	Beban Barang dan Jasa	119.634.062	187.371.014
	i	Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
	j	Kerugian terkait risiko operasional		
		i. Kecurangan internal	0	0
		ii. Kejahatan eksternal	0	0
	k	Pajak-pajak	54.634.086	53.815.208
7		Beban Lainnya		
	a	Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
	b	Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
	c	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
	d	Kerugian penjualan AYDA	0	0
	e	Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
	f	Lainnya	15.350.929	14.051.185
Laba (Rugi) Operasional			31.516.704	56.142.483
Pendapatan Non Operasional			0	0
1		Keuntungan Penjualan		
	a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2		Pemulihan Penurunan Nilai		
	a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
	b	Lainnya	0	0
3		Bunga Antar Kantor	0	0
4		Selisih Kurs	0	0
5		Lainnya	0	0
Beban Non Operasional			0	133.019
1		Kerugian Penjualan/Kehilangan		
	a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2		Kerugian Penurunan Nilai		
	a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
	b	Lainnya	0	0
3		Bunga Antar Kantor	0	0
4		Selisih Kurs	0	0
5		Lainnya	0	133.019
Laba (Rugi) Non Operasional			0	(133.019)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak			31.516.704	56.009.464
Taksiran Pajak Penghasilan			2.995.960	2.036.564
Pendapatan Pajak Tangguhan			0	0
Beban Pajak Tangguhan			0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan			28.520.744	53.972.900

Nama Rekening			Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
Penghasilan Komprehensif Lain				
1	Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
	a.	Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
	b.	Lainnya	0	0
	c.	Pajak Penghasilan terkait	0	0
2	Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi			
	a.	Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
	b.	Lainnya	0	0
	c.	Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak			0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan			0	0

Kode Form	: Form B.03.00
Nama Form	: LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2024	Posisi 31 Desember 2023
Tagihan Komitmen			
a.	Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b.	Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen			
a.	Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b.	Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
c.	Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi			
a.	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1)	Bunga Kredit yang Diberikan	128.105.357.150	70.904.710.500
2)	Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3)	Surat Berharga	0	0
4)	Lainnya	0	0
b.	Aset Produktif yang dihapusbuku		
1)	Kredit yang Diberikan	772.654.575	774.348.075
2)	Penempatan pada Bank Lain	0	0
3)	Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	3.962.897.150	153.559.341.913.300
4)	Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c.	Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d.	Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi		0	0
Rekening Administratif Lainnya		0	0

Kode Form	: Form B.04.00
Nama Form	: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
Saldo per 31 Des Tahun 2022	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	6.033.714.378	8.436.714.378
Dividen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0	0	0	0	53.972.900	53.972.900
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	- 11.153.944	- 11.153.944
Saldo per 31 Des Tahun 2023	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	6.076.533.334	8.479.533.334
Dividen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0	0	0	0	28.520.744	28.520.744
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	- 10.202.006	- 10.202.006
Saldo per 31 Des Tahun 2024	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	6.094.852.072	8.497.852.072

Kode Form	: Form B.05.00
Nama Form	: LAPORAN ARUS KAS
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Pos	31 Des 2024	31 Des 2023
Penerimaan pendapatan bunga	2.386.261.761	2.412.490.821
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	87.417.296	97.024.599
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	1.693.500	0
Pendapatan operasional lainnya	39.925.543	35.004.420
Pembayaran beban bunga	(528.802.489)	(523.256.181)
Beban gaji dan tunjangan	(943.890.816)	(889.130.197)
Beban umum dan administrasi	(995.737.162)	(1.061.806.775)
Beban operasional lainnya	(15.350.929)	(14.184.204)
Pendapatan non operasional lainnya	0	0
Beban non operasional lainnya	0	(133.019)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.995.960)	(2.036.564)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(476.430.825)	1.032.215.317
Kredit yang diberikan	(589.218.697)	(397.183.999)
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	(6.771.741)	19.731.404
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	5.828.428	11.910.887
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	101.169.182	(37.989.618)
Tabungan	158.110.469	(115.830.474)
Deposito	761.000.000	(506.000.000)
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	1.855.096	(20.645.123)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	(15.937.344)	40.181.294
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	0	0
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0

Pos	31 Des 2024	31 Des 2023
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	0	0
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	(10.202.006)	(11.153.944)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(10.202.006)	(11.153.944)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	(26.139.350)	29.027.350
Kas dan setara Kas awal periode	96.019.350	66.992.000
Kas dan setara Kas akhir periode	69.880.000	96.019.350

Kode Form	: Form C.01.00
Nama Form	: LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan

Registered Public Accountant, Tax & Management Consultant

No. Izin UKAP : Kep - 3539/M.6/2003

Nomor : 00064/2.0570/AU.2/07/1371-3/1/V/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT. BPR NEHEMIA
JL. Raya Padalarang No. 546, Kab. Bandung barat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR NEHEMIA yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan pada lampiran yang disertakan disajikan untuk tujuan analisis tambahan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar dalam semua hal material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, MSc, & Rekan
Rekan,



Mochammad Rivali, SE., Ak., CA., CPA
No. Izin AP : 1371
No. Izin UKAP : Kep-353/KM.6/2003

Bandung, 06 Mei 2025



Kode Form	: Form C.02.00
Nama Form	: OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
Wajar Tanpa Pengecualian	Mochamad Rivai

Kode Form	: Form D.00.00
Nama Form	: SURAT PERNYATAAN DIREKSI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
NEHEMIA**

Jl. Raya Padalarang No. 546 Telp. (022) 6809121 – Fax. (022) 6808456
Padalarang 40553, Kabupaten Bandung Barat

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang
**TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
PT. BPR NEHEMIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edrianto Sitorus
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR NEHEMIA
Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 546 Kab. Bandung Barat

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA
2. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Intern dalam PT. BPR NEHEMIA

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT. BPR NEHEMIA



Edrianto Sitorus
Direktur Utama

Kode Form	: Form E.01.00
Nama Form	: RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Deskripsi	Keterangan
Alamat	: Jl. Raya Padalarang No. 546
No. Telepon	: (022)6809121
Penjelasan Umum	: Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR semakin meningkat, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9/POJK.03/2024 tanggal 14 Juni 2024, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran serta menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, hal ini mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh BPR Nehemia, yang terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola atau GCG. BPR menilai bahwa GCG sudah saatnya untuk di laksanakan, mengingat bahwa BPR sebagai

			salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di wilayah kerja BPR.
Peringkat	Komposit	Hasil	: 2 (Baik)
Penilaian	Sendiri	(Self	
Assesment)	Tata Kelola		
Penjelasan	Peringkat	: Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola	
Komposit	Hasil	Penilaian	yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan
Sendiri	(Self	Assesment)	yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat
Tata Kelola			kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum
			kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat
			diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR.

Kode Form	: Form E.02.01
Nama Form	: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: *****
	Nama	: Edrianto Sitorus
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	• Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mengetahui Komisaris. • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. • Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Direksi telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi • Dalam rangka mendukung terselenggaranya GCG, Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional. • Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,

	waktu kerja dan peraturan rapat.	
2	NIK :	*****
	Nama :	Nimas Ayu Pamungkas
	Jabatan :	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	• Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mengetahui Komisaris. • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. • Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Direksi telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi • Dalam rangka mendukung terselenggaranya GCG, Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional. • Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR, Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Audit ekstern yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR sebagimnana rekomendasi Dewan Komisaris yang dituangkan dalam RUPS BPR, Mengetahui Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komisaris, Mengetahui Pembagian Tugas, Wewenang & Tanggungjawab		

Direksi, Mengetahui RBB tahun 2025, Mengetahui berbagai Kebijakan/Keputusan Direksi dalam operasional dan kredit, sebagai acuan Direksi dalam menjalankan bisnis BPR. Adapun Pembentukan Pejabat Eksekutif APU&PPT, Managemen Risiko dan Kepatuhan, belum dapat ditindak lanjuti kembali pasca pengunduran diri pejabat eksekutif dimaksud.

Kode Form	: Form E.02.02
Nama Form	: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	NIK	: *****
	Nama	: Rosi Rostianti
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. • Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan saran kepada Direksi. • Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. • Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan otoritas jasa Keuangan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen. • Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : ➢ Penyediaan dana kepada pihak terkait ➢ Memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
2	NIK	: *****
	Nama	: Pahala Silitonga
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. • Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan saran kepada Direksi. • Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. • Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi

	menindaklanjuti hasil temuan otoritas jasa Keuangan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen. • Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : ➢ Penyediaan dana kepada pihak terkait ➢ Memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
• Pembentukan Pejabat Eksekutif APU&PPT, Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta Internal Audit • Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR. • Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Audit ekstern yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR. • Mengetahui Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komisaris. • Mengetahui Pembagian Tugas, Wewenang & Tanggungjawab Direksi. • Mengetahui RBB tahun 2025 • Mengetahui berbagai Kebijakan/Keputusan Direksi dalam operasional dan kredit, sebagai acuan Direksi dalam menjalankan bisnis BPR.	

Kode Form	: Form E.02.03
Nama Form	: TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Program Kerja dan realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

Modal inti BPR sampai dengan akhir tahun 2024 kurang dari Rp. 50.000.000,- ribu (lima puluh milyar), oleh karena itu BPR belum membentuk fungsi komite-komite.

Kode Form	: Form E.02.04
Nama Form	: STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tdk)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	

Modal inti BPR sampai dengan akhir tahun 2024 kurang dari Rp. 50.000.000,- ribu (lima puluh milyar), oleh karena itu BPR belum membentuk fungsi komite-komite.

Kode Form	: Form E.03.01
Nama Form	: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	NIK	Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR						
1	*****	Edrianto Sitorus	480.000.000	24,00	480.000.000	24,00
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	0	0	0	0
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR						
1	*****	Rosi Rostianti	0	0	0	0
2	*****	Pahala Silitonga	0	0	0	0

Kode Form	: Form E.03.02
Nama Form	: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	NIK	Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	*****	Edrianto Sitorus	-	0	0
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	0	0
3	*****	Rosi Rostianti	-	0	0
4	*****	Pahala Silitonga	-	0	0

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada Kelompok Usaha.

Kode Form	: Form E.03.03
Nama Form	: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	NIK	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	*****	Edrianto Sitorus	-	-	0
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	-	0
3	*****	Rosi Rostianti	-	-	0
4	*****	Pahala Silitonga	-	-	0

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.

Kode Form	: Form E.04.01
Nama Form	: HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR					
1	*****	Edrianto Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Hubungan Keuangan Anggota Dewan komisaris pada BPR					
1	*****	Rosi Rostianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Pahala Silitonga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR					
1	*****	Robinson Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Edrianto Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi BPR NEHEMIA tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham BPR. Anggota Dewan Komisaris BPR NEHEMIA tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi lainnya, ataupun dengan Pemegang Saham BPR.

Kode Form	: Form E.04.02
Nama Form	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi	: 31 DESEMBER 2024
Laporan	

No.	NIK	Nama	Hubungan Keluarga		
			I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR					
1	*****	Edrianto Sitorus	-	-	Edrianto Sitorus-Robinson Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Edrianto Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Robinson Sitorus.
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	-	-
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR					
1	*****	Rosi Rostianti	-	-	-
2	*****	Pahala Silitonga	-	-	-
Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR					
1	*****	Robinson Sitorus	Robinson Sitorus - Edrianto Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Robinson Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Edrianto Sitorus.	-	-
2	*****	Edrianto Sitorus	-	-	Edrianto Sitorus-Robinson Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Edrianto Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Robinson Sitorus.

Kode Form	: Form E.05.00
Nama Form	: PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Thn)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	320.700.000	2	141.600.000
2	Tunjangan	2	35.348.408	2	20.984.836
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total Remunerasi		356.048.408		162.584.836
	Fasilitas Lain				
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
	Total Fasilitas Lain		0		0
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		356.048.408		162.584.836

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan RUPS

Kode Form	: Form E.06.00
Nama Form	: RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.19
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3.23
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.07
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.29
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4.90

Besaran Gaji minimum yang diberikan kepada pegawai BPR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kode Form	: Form E.07.01
Nama Form	: PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22/04/2024	4	Tindak Lanjut Exit Meeting, Evaluasi Penerapan APU PPT, Evaluasi Realisasai Rencana Bisnis BPR
2	18/07/2024	4	Isu-isu strategis BPR, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategi sBPR, Evaluasu Rencana Bisnis BPR
3	16/10/2024	4	Cut off pembayaran tunggakan bunga kredit hapus buku, evaluasi dan Strategi peningkatan kinerja BPR NEHEMIA
4	10/12/2024	4	Evaluasi kebijakan dan strategi BPR, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR tahun 2024, Rencana Bisnis BPR 2025

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

Kode Form	: Form E.07.02
Nama Form	: KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	*****	Rosi Rostianti	4	0	100.00
2	*****	Pahala Silitonga	4	0	100.00

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

Kode Form	: Form E.08.00
Nama Form	: JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL 9INTERNAL FRAUD)
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	1	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Berkaitan dengan Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit BPR NEHEMIA selama tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan atau fraud, pencegahan fraud dilakukan BPR dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja lain yang terkait, dengan demikian dapat mencegah terjadinya fraud sedini mungkin.

Kode Form	: Form E.09.00
Nama Form	: PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Uraian Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh BPR Nehemia, selama tahun 2024, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Kode Form	: Form E.10.00
Nama Form	: TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

No.	Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	*****	Edrianto Sitorus	Direktur Utama	*****	Nimas Ayu Pamungkas	Direktur	Sewa Gedung Kantor	500	Jenis Transaksi belum sesuai dengan ketentuan interan
2	*****	Edrianto Sitorus	Direktur Utama	*****	Nimas Ayu Pamungkas	Direktur	Sewa Kendaraan	186	Jenis Transaksi sesuai dengan ketentuan interan, pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak ada keterkaitan

Jika terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, dalam hal pengambilan keputusan, BPR terlebih dahulu menggunakan jasa penilai sebagai acuan penetapan harga atau melakukan perbandingan harga barang sejenis, dengan demikian BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

Kode Form	: Form E.11.00
Nama Form	: PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-

Dalam rencana bisnis BPR tidak mengkhususkan atau membuat target anggaran perihal dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila BPR menerima proposal permohonan dana untuk penyelenggaraan suatu kegiatan, terlebih dahulu BPR melakukan analisa kelayakan profosal dimaksud, adapun kaitannya dengan kegiatan politik, BPR tidak berpartisipasi, BPR turut berpartisipasi menyukkseskan program Literasi Edukasi serta inklusi keuangan yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan, yang merupakan Program pencanangan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk kepedulian untuk turut serta mendidik masyarakat agar lebih mengenal perbankan. Rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud telah tertuang dalam RBB BPR Tahun 2024, akan tetapi dalam pelaksanaannya rencana tersebut tidak dapat direalisasikan .

Kode Form	: Form F.00.00
Nama Form	: DOKUMEN PENDUKUNG
Nama LJK	: PT. BPR NEHEMIA
Posisi Laporan	: 31 DESEMBER 2024

L A P O R A N
PENILAIAN SENDIRI
TATA KELOLA YANG BAIK
(SELF ASSESMENT GCG)
TAHUN 2024
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Nehemia

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Nehemia
Alamat BPR	Jl. Raya Padalarang No. 546 Kab. Bandung Barat
Posisi Laporan	Desember, 2024
Modal Inti BPR	Rp 8.483.591.700,39
Total Aset BPR	Rp 20.065.356.933,26
Bobot Faktor BPR	B

A. Faktor 1 (Aspek Pemegang Saham)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
I.	Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Struktur pemegang saham telah sesuai dengan Akta Notaris Indirawati Hayuningtyas, SH. No. 85 tanggal 21 September 2022 dan telah ditatausahakan dalam Administrasi Pengawasan OJK. No. S.232/KR.0212/2022 tanggal 21 November 2022. sehingga komposisi pemegang saham BPR menjadi sebagai berikut : Robinson Sitorus 76 % dan Edrianto Sitorus 24 % dari jumlah modal disetor sebesar Rp. 2 milyar.
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	3	Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisari	3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, salah satunya melalui RUPS Tahunan yang merupakan pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris dalam mengelola BPR dalam periode satu tahun. dan pertemuan-pertemuan non formal.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	3	Pemantauan Pemegang Saham terhadap perkembangan BPR melalui laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham, atas hasil-hasil yang diperoleh BPR selama periode tertentu, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan BPR pada periode tertentu.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	2	Pemegang saham mendukung pengembangan BPR atas perencanaan permodalan BPR, tercermin dari penundaan penarikan deviden untuk memenuhi permodalan BPR,

			sebagaimana di atur dalam RUPS BPR.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	3	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan dan menampung, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	CUKUP BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	2	Hak dan perlakuan Pemegang saham telah diatur dalam anggaran dasar dan RUPS, tersermin dari kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	2	Permodalan BPR sebagai penunjang perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	3	Seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	2	Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 1			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,55	3	Cukup Baik dan Cukup Memadai
Nilai Rata-rata	2,50	Positif	Struktur dan/atau infrastuktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata Kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata Kelola yang cukup baik. Kondisi yang adapt menjadi indicator tersebut antara lain : a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.			
Faktor Positif	Struktur pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
Faktor Negatif	Tidak Ada					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,80	Negatif				
Faktor Positif	Pemegang Saham mendukung pengembangan BPR					
Faktor Negatif	Belum Optimal dalam mengkomunikasikan Visi dan Misi pengembangan BPR					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,25	Positif				
Faktor Positif	Setiap Pemegang Saham diperlakukan Secara Adil					
Faktor Negatif	Tidak Ada					

B. Faktor 2 (Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Direksi)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	1	Modal Inti BPR kurang dari 50 M, BPR memiliki dua orang anggota Direksi, salah satu anggota Direksi membawahi fungsi kepatuhan sbb : 1. Edrianto Sitorus (Direktur Utama) sebagai Direktur Bisnis, 2. Nimas Ayu Pamungkas (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi PT BPR Nehemia tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	3	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi belum dapat direalisasikan kembali, diantaranya pembentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Akan tetapi proses pemeruan tetap diupayakan melalui pembukaan loker.

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	3	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan antara lain : persyaratan menjadi anggota Direksi, Ketentuan jabatan rangkap anggota Direksi, independensi (kemandirian) anggota Direksi, prosedur pengangkatan anggota Direksi, Komposisi Direksi, fungsi Direksi, tugas dan kewajiban Direksi, masa jabatan anggota Direksi, Fasilitas Direksi, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Direksi, Waktu Kerja anggota Direksi, Rapat Direksi, yang mengacu pada Anggaran Dasar BPR.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	3	Direksi telah menetapkan remunerasi bagi pegawai tetap, serta mengevaluasi secara berkala pemberian remunerasi bagi pegawai kontrak setiap perpanjangan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Kondisi dimaksud tidak ada di BPR Nehemia, kecuali penyedia jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	2	Hal dimaksud telah dilakukan Dewan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan
Total nilai skala penerapan		19	
Rata-rata		2,11	BAIK
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	2	Tugas dan tanggungjawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Tata tertib Direksi, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan independen. Terkait pengalihan tugas dan wewenang, apabila direksi berhalangan hadir maka tugas dengan batasan tertentu diberikan kepada bagian terkait sesuai dengan kewenangannya, dan tetap mengkomunikasikan dengan Direksi atas keputusan yang diambil.

11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	3	Kondisi dimaksud belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena belum terpenuhinya STO BPR di antaranya mgangangkat kembali PE manajemen risiko dan PE kepatuhan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Upaya pemenuhan kembali telah dilakukan BPR, namun belum dapat direalisasikan.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	3	Temuan audit telah ditindak lanjuti, Adapun temuan OJK sehubungan dengan pemenuhan stuktur organisasi belum dapat ditindaklanjuti. namun demikian upaya pemenuhan kembali telah dilakukan BPR, dengan melakukan rekrutmen namun belum dapat direalisasikan.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didokumentasikan.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	2	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat sebelum rapat ditutup.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dalam hal ini seluruh kegiatan operasional BPR telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Demikian pula dalam hal penyediaan barang dan asa telah di atur dalam SOPS BPR.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2	Hal dimaksud telah dilakukan Dewan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan,

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	3	Kebijakan kepegawaian diatur dalam Peraturan Perusahaan BPR dan telah disampaikan pada seluruh pegawai sejak pertama kali bergabung dengan BPR, dan pada keputusan Direksi serta arahan-arahan Direksi.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	1	Terdapat kepemilikan saham oleh Anggota Direksi sebesar 24 % dari modal disetor yang dimiliki oleh Direktur Utama (Edrianto Sitorus), dan ada hubungan keluarga dengan pemegang saham BPR (Robinson Sitorus).
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	3	Anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan menerapkan langkah-langkah strategi serta keputusan untuk peningkatan kinerja BPR.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	2	Kondisi dimaksud telah dilakukan, dimana dalam pengelolaan operasional BPR, Direksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta tata tertib kerja anggota Direksi yang dievaluasi setiap ada perubahan ketentuan.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	2	Evaluasi kebijakan remunerasi telah dilakukan oleh Direksi terhadap pegawai BPR, khususnya pegawai kontrak mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
	Total nilai skala penerapan	29	
	Rata-rata	2,23	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali, terakhir BPR Nhemia telah menyelenggarakan RUPS dimaksud pada tanggal 25 April 2024
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	2	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR. dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang

			telah ditetapkan BPR
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	2	Seluruh Keputusan Direksi di buat dalam bentuk SK Direksi dan telah didokumentasikan, yang akan digunakan sebagai acuan Direksi dalam pengelolaan BPR yang melibatkan seluruh lini organisasi BPR, guna mencapai tujuan usaha.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	2	Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan akan tetapi belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Direksi
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	2	Hal dimaksud telah dilakukan Dewan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan, Demikian juga pengembangan SDM BPR diberikan terhadap seluruh karyawan secara berkelanjutan dengan memperhatikan azas skala prioritas, dengan materi pendidikan dan pelatihan mengacu pada Rencana Bisnis BPR, sesuai dengan kebutuhan BPR, tehnik penyampaian pelatihan melalui in house training atau lembaga pendidikan ekstern.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	Laporan GCG disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR di Indonesia
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 2			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,14	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,11	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi belum melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif			
Faktor Positif	Secara umum struktur tata Kelola Direksi termasuk baik dan memadai					
Faktor Negatif	Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia untuk struktur organisasi , yaotu belum di tunjuknya Pejabat Eksekutif kecuali PE APU PPT & PPPSPM					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,23	Positif				
Faktor Positif	Secara umum tata Kelola Direksi telah dilaksanakan sesuai POJK					
Faktor Negatif	Direksi belum optimal dalam pemenuhan temuan OJK, yaitu					

	pemenuhan STO.		dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi namun penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.
Hasil Tata Kelola			
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	
Faktor Positif	Secara umum hasil tata Kelola direksi telah dilaksanakan sesuai POJK		
Faktor Negatif	Tidak ada		

C. Faktor 3 (Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Komisaris)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	2	Sesuai dengan Modal Inti BPR Nehemia kurang dari 50 M memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak dua orang, terdiri dari Komisaris Utama (Rosi Rostianti) dan anggota Dewan Komisaris (Pahala Silitonga), keduanya merupakan Dewan Komisaris independen.
2.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
3.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan antara lain : persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris, Ketentuan jabatan rangkap anggota Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Gaji dan Fasilitas Dewan Komisaris, yang mengacu pada Anggaran Dasar BPR.
4.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apapun.
5.	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
6.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan dimaksud, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

7.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, melalui Sertifikat Kompetensi Komisaris dari BNSP pada tanggal 09 November 2020 (berlalu 5 tahun) dan telah diangkat kembali melalui RUPSLB pada tanggal 19-09-2022 seanjutnya di buat Akta Notarisnya pada tanggal 24 September 2022 No. 85 oleh Notaris Indirawati Hayuningtyas, SH yang berkedudukan di Padalatang Kabupaten Bandung Barat, dan telah tercatat dalam administrasi OJK melalui suran OJK No. S-3/KR.,021/2023 tanggal 06 Januari 2023 Perihal Penatausahaan pengangkatan Kembali Pengurus PT RPR Nehemia dan Sanksi Laporan Bulanan. Namun dalam masa jabatan periode terakhir pelaksanaan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris dilakukan setelah berakhirnya masa jabatannya, oleh karenanya BPR kena denda hal ini telah ditindaklanjuti.
8.	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi sebagaimana diatur dalam RUPS BPR yang berbunyi "Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lain bagi Direksi." Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dibuat berita acara Rapat Komisaris. Adapun remunerasi Dewan Komisaris telah diatur dalam RUPS BPR.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan / atau keputusan RUPS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana dimaksud, dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris. sebagaimana ketentuan yang berlaku.

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	2	Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ranahnya telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, baik formal dalam bentuk Risalah Rapat Komisaris maupun formal dalam bentuk arahan-arahan
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Hal ini telah diatur dalam SOP Kredit BPR Nehemia, poin 3.4.2. tentang batas wewenang persetujuan kredit, no. 3, bahwa untuk pemberian kredit kepada pihak terkait sebagaimana kerentanan yang mengancam mengenai batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka Dewan Komisaris turut serta dalam pengambilan keputusan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan sebagian besar hasil temuan OJK dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada OJK
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	2	Permasalahan yang dihadapi BPR sampai saat ini, terkait melambatnya perkembangan kinerja BPR, Direksi telah memberikan penjelasan dan mencari solusi terbaik dalam pemecataannya, hal ini telah dikoordinasikan dan menjadi agenda rapat internal BPR, baik dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris maupun rapat Direksi dengan seluruh karyawan, untuk memperoleh langkah-langkah strategi yang tepat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	3	Kondisi dimaksud telah dilakukan, dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta tata tertib kerja Dewan Komisaris yang dievaluasi setiap ada perubahan ketentuan.

15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, hasil rapat telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat komisaris
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris telah direlenggarakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, hasil rapat telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat Komisaris, yang mana keputusan rapat ditetapkan dari hasil musyawarah untuk mencapai mufakat seluruh peserta rapat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Dalam hal ini seluruh kegiatan operasional BPR telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Demikian pula dalam hal penyediaan barang dan jasa telah di atur dalam SOP BPR.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan sebagian besar hasil temuan OJK dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada OJK Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas tugas Direksi serta memberikan nasihat dan arahan dalam pelaksanaannya. Adapun tindak lanjut Direksi atas hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagian besar dapat direalisasikan.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	2	Sehubungan dengan modal onti yang dimiliki BPR, maka BPR tidak membentuk komite remunerasi dan nominasi sehingga terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. mengacu kepada keputusan RUPS

20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	2	Terkait dengan modal inti yang dimiliki BPR, maka BPR tidak membentuk komite
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	2	Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. mengacu kepada keputusan RUPS
	Total nilai skala penerapan	28	
	Rata-rata	2,15	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Hal dimaksud telah dilakukan, secara berkala, terakhir dilakukan pada tanggal 25 April 2024 dalam pelaksanaan RUPS Tahunan BPR NEHEMIA
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	3	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	Laporan dimaksud telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dan tepat waktu
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Anggota Dewan Komisaris, terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dalam rangka peningkatan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 3			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,15	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan			
Faktor Positif	Pemenuhan Struktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK					
Faktor Negatif	Tidak Ada					
Proses Tata Kelola						

Nilai Rata-rata	2,15	Positif
Faktor Positif	Proses tata Kelola Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK	
Faktor Negatif	Tidak ada	
Hasil Tata Kelola		
Nilai Rata-rata	2,40	Positif
Faktor Positif	Secara umum Hasil Tata Kelola Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK	
Faktor Negatif	Tidak ada	

ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginginkan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

D. Faktor 4 (Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak membentuk Komite Direksi danay membentuk Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp. 50 M yang sesuai POJK.
2.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, Karena Direksi tidak membentuk Komite
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	2	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite pemantau Risiko dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	2	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris disebabkan modal inti di bawah Rp.50 M sesuai POJK. Sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib Komite
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	2	Komite Kredit selalu menerima masukan dari Fungsi Kepatuhan sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	2	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab Modal Inti BPR di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	2	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak membentuk Komite.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 4			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,00	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	BPR tidak membentuk Komite sebab Modal Inti dibawah Rp. 50 M.			
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	-					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	-					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	-					

E. Faktor 5 (Penanganan Benturan Kepentingan)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan, yang mana hal-hal dimaksud telah diatur didalamnya.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	2	Hal dimaksud telah diatur dalam SOP Benturan Kepentingan, Bab. IV angka (6) yang menyatakan bahwa "Jika terjadi berturan kepentingan maka karyawan yang bersangkutan dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap putusan."
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	2	Seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, Seandainya pun terjadi benturan maka keputusan yang diambil mengacu pada SOP benturan kepentingan
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	2	Hal dimaksud telah diatur dalam SOP Benturan Kepentingan, Bab. IV angka (7) yang menyatakan bahwa "Pengungkapan benturan kepentingan tersebut diatas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama baik yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan."
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	2	Penanganan benturan kepentingan mengacu pada SOP BPR
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 5			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,00	2	Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginisikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.			
Faktor Positif	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan					
Faktor Negatif	-					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	Penangan Benturan kepentingan telah di tuangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan					
Faktor Negatif	-					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	Secara umum Hasil tata Kelola telah dilaksanakan sesuai POJK					
Faktor Negatif	-					

F. Faktor 6 (Penerapan Fungsi Kepatuhan)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Penerapan Fungsi kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penunjukan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2.	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksuf mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan.
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah 107menyusun107 dan/atau menginikan pedoman kerja, 107ingka dan prosedur kepatuhan.	4	BPR belum menunjuk 107Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksuf mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan.
4.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4	BPR belum menunjuk 107Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksuf mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	3,25	CUKUP BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai 107ingkat107107n, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah 107menyusun kebijakan (sop) kepatuhan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Secara bertahap kondisi dimaksud telah dilakukan
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, 107ingka dan prosedur kepatuhan.	3	BPR belum menunjuk 107ingkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksuf mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan.

	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan 108 tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR belum dapat merealisasikan pemenuhan kekosongan STO diantaranya penunjukan PE.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 6			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,78	3	Cukup Baik dan Cukup Memadai
Nilai Rata-rata	3,25	Negatif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif sehingga belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.			
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					
Faktor Negatif	BPR belum menunjuk 108Pejabat Eksekutf yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksuf mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan Kepatuhan.					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,33	Positif				
Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah 108menyusun kebijakan untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.					
Faktor Negatif	-					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,50	Positif				
Faktor Positif	Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan telah disusun dan dilaporkan kepada OJK					
Faktor Negatif	Beleum terpenuhinya STO yaitu PE Kepatuhan					

G. Faktor 7 (Penerapan fungsi Audit Intern)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum menunjuk kembali Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri.
2.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR belum menunjuk Kembali pejabat yang dimaksud, namun pedoman dan tata tertib kerja dikinakan sesuai dengan ketentuan.
3.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	3	Pelaksanaan dan Prosedur Fungsi Audit telah di atur dalam SOP BPR. yang mana Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap manajemen mengenai kecukupan, efektifitas pengendalian manajemen pada semua kegiatan yang berlangsung di BPR.
4.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	Dalam Struktur Organisasi BPR, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4	BPR belum menunjuk kembali Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	3,20	CUKUP BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Dalam menerapkan fungsi audit intern BPR, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi	3	Sesuai dengan ketentuan kondisi dimaksud belum diterapkan di BPR

	audit intern.		
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan dan Prosedur Fungsi Audit telah di atur dalam SOP BPR. yang mana Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap manajemen mengenai kecukupan, efektifitas pengendalian manajemen pasa semua kegiatan yang berlangsung di BPR.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	3,00	CUKUP BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Hal dimaksud telah di buat dan dipresentasikan
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	CUKUP BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 7			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	3,09	3	Cuku Baik dan Cukup Memadai
Nilai Rata-rata	3,20	Negatif	Belum terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Belum menunjuk Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Dewan Komsaris b. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.			
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	3,00	Negatif				
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern sehingga proses Audit dilaksanakan oleh Dewa Komisaris					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	3,00	Negatif				
Faktor Positif	BPR telah menyampaikan Laporan kepada OJK tentang Pokok hasil Audit					

Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern sehingga proses Audit dilaksanakan oleh Dewa Komisaris
----------------	--

H. Faktor 8 (Penerapan fungsi Audit Ekstern)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total 113ubli paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar 113ublic113ional akuntan 113ublic, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	2	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2024 adalah Akuntan Publik Mochammad Rivai, SE. AK., CA., CPA. Dan Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M. Sc. & Rekan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.melali surat BPR Nomor : 09/BN/DIR/LRPK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perihal Laporan Tahunan Periode 2023 PT. BPR NEHEMIA
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	2	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk pada tanggal 22 April 2024
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 8			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,00	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.			
Faktor Positif	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan POJK					
Faktor Negatif	-					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	Pelaksanaan Audit laporan keuangan BPR dilakukan oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK					
Faktor Negatif	-					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	Hasil audit telah dilaporkan kepada OJK					
Faktor Negatif						

I. Faktor 9 (Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk pengendalian Intern)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum menunjuk kembali Pejabat dimaksud setelah mengundurkan diri pejabat dimaksud
2.	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPR memiliki SOP Manajemen Risiko yang mana didalamnya mencakup Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3.	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	Kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, diatur dalam SOP Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	CUKUP BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	BPR belum menunjuk kembali Pejabat dimaksud setelah mengundurkan diri pejabat dimaksud
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas hal-hal dimaksud sesuai dengan kewenangannya.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	3	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	3	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Upaya BPR dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Upaya BPR dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi yang dimiliki BPR masih dalam pengembangan dan penyempurnaan

14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip manajemen risiko, yang dilakukan baik secara formal melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko untuk peningkatan kompetensi SDM, atau informal berupa atahan-arahan Direksi.
	Total nilai skala penerapan	34	
	Rata-rata	3,09	CUKUP BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui Aplikasi Pelaporan Apollo, esesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	3	BPR telah menyusun laporan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui Aplikasi Pelaporan Apollo, esesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	CUKUP BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 9			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	3,06	3	Cukup Baik dan Cukup Memadai
Nilai Rata-rata	3,33	Negatif	Belum terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR belum memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.			
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE Manajemen Risiko					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	3,09	Negatif				
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE Manajemen Risiko					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,67	Negatif				
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	BPR telah Menyusun Laporan Profil Risiko tetapi belum secara optimal.					

		b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
--	--	--

J. Faktor 10 (Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		(Wajib diisi oleh BPR)
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2	BPR telah memiliki kebijakan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pengkinian dimaksud telah dilakukan pada tanggal 27 September 2024.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan akhir tahun 2024 tidak terdapat pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan akhir tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas .
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan	Nilai Faktor 10
-------------------	------------------------

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,00	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait, dan tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK.			
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK					
Faktor Negatif	-					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	Proses pemberian kredit selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK					
Faktor Negatif	-					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,20	Positif				
Faktor Positif	Sampai dengan masa Laporan tidak ada Pelanggaran maupun Pelampauan BMPK					
Faktor Negatif	-					

K. Faktor 11 (Integritas pelaporan dan sistem teknologi Informasi)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	3	Sistem Informasi Manajemen BPR masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	4	Sistem Informasi Manajemen BPR masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	3,67	KURANG BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	3	Hal dimaksud belim sepenuhnya dilakukan
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Lapoan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK

7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan OJK
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK
9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan OJK
Total nilai skala penerapan		14	
Rata-rata		2,33	BAIK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	2	Hal dimaksud tidak pernah dilakukan BPR
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	1	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK melalui aplikasi SIPEDULI
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		1,67	SANGAT BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 11			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,50	3	Cukup Baik dan Cukup Memadai
Nilai Rata-rata	3,67	Negatif	Terpenuhinya Sebagian struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan belum didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan			
Faktor Positif	-					
Faktor Negatif	Sistem Informasi Manajemen masih perlu adanya perbaikan					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,33	Positif				
Faktor Positif	Penyusunan Laporan telah sesuai					

	dengan POJK		termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.
Faktor Negatif	-		
Hasil Tata Kelola			
Nilai Rata-rata	1,67	Positif	
Faktor Positif	Secara umum Hasil Tata Kelola Integritas Pelaporan Keuangan Cukup baik		
Faktor Negatif	-		

L. Faktor 12 (Rencana Bisnis BPR)

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	pemegang saham mendukung atas RBB BPR
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	BAIK
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis BPR disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. sesuai dengan kewenangannya
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	CUKUP BAIK
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	2	BPR belum dapat mencapai target yang telah direncanakan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	BAIK

Kesimpulan			Nilai Faktor 12			
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			Nilai	2,29	2	Baik dan Memadai
Nilai Rata-rata	2,00	Positif	Terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan namun indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.			
Faktor Positif	RBB disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi Misi BPR					
Faktor Negatif	-					
Proses Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	3,00	Negatif				
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB					
Faktor Negatif	RBB tahun sebelumnya yang menjadi acuan RBB tahun berikutnya belum sepenuhnya tercapai.					
Hasil Tata Kelola						
Nilai Rata-rata	2,00	Positif				
Faktor Positif	RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan					
Faktor Negatif						

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2
Predikat Komposit	BAIK												

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR.

Faktor Positif

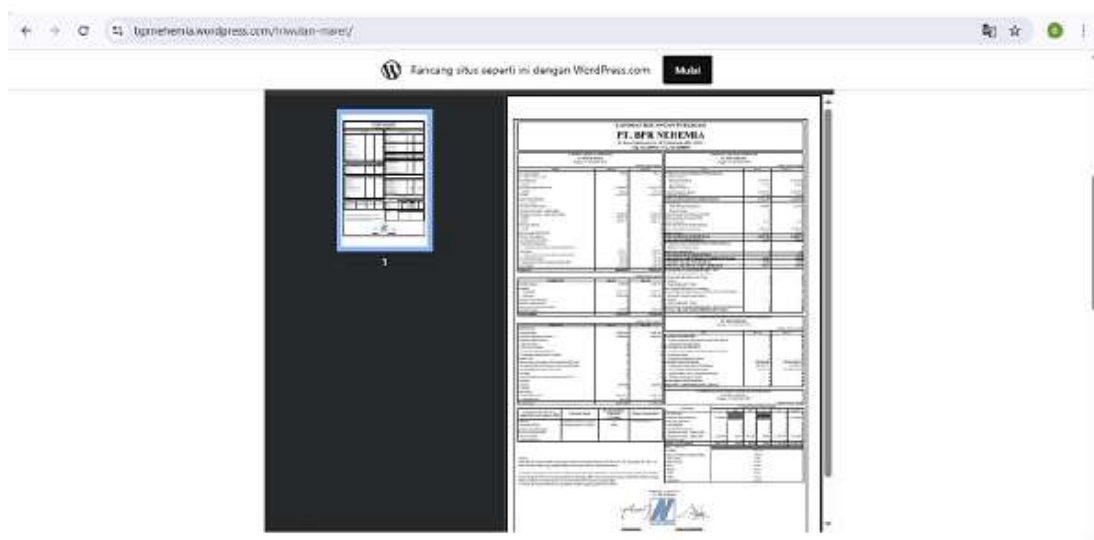
- Aspek Pemegang Saham
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Rencana Bisnis BPR

Faktor Negatif

- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

L A P O R A N
Keuangan Publikasi
TAHUN 2024
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Nehemia

Laporan Publikasi Pada WEB BPR



Laporan Publikasi Pada Koran Lokal

Banking, 04 Mei 2022
PT. BPR NEHEMIA (Persero) Tbk.
Divisi Keuangan & Manajemen Risiko & Perbankan
Regional Commercial Finance & Recovery 04

BNi

Banking, 04 Mei 2022
PT. BPR NEHEMIA (Persero) Tbk.
Divisi Keuangan & Manajemen Risiko & Perbankan

Banking, 04 Mei 2022
PT. BPR NEHEMIA (Persero) Tbk.
Divisi Keuangan & Manajemen Risiko & Perbankan

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PT. BPR NEHEMIA
R. Rupa Pabulung No. 546 Pabulung 8200 4000
Telp. 022-4899121 / Fax. 022-4899456

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PT. BPR NEHEMIA
Tanggal: 31 Desember 2021

Aset	31 Desember 2021		Liabilitas & Ekuitas
	31 Des 21	31 Des 20	
A. Aset Tetap	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
B. Aset Tidak Tetap	10.000	10.000	
C. Aset Lancar	10.000	10.000	
D. Aset Lainnya	10.000	10.000	
E. Aset Lainnya	10.000	10.000	
F. Aset Lainnya	10.000	10.000	
G. Aset Lainnya	10.000	10.000	
H. Aset Lainnya	10.000	10.000	
I. Aset Lainnya	10.000	10.000	
J. Aset Lainnya	10.000	10.000	
K. Aset Lainnya	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
L. Aset Lainnya	10.000	10.000	
M. Aset Lainnya	10.000	10.000	
N. Aset Lainnya	10.000	10.000	
O. Aset Lainnya	10.000	10.000	
P. Aset Lainnya	10.000	10.000	
Q. Aset Lainnya	10.000	10.000	
R. Aset Lainnya	10.000	10.000	
S. Aset Lainnya	10.000	10.000	
T. Aset Lainnya	10.000	10.000	

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PT. BPR NEHEMIA
Tanggal: 31 Desember 2021

Liabilitas & Ekuitas	31 Desember 2021		Aset
	31 Des 21	31 Des 20	
A. Liabilitas	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
B. Liabilitas	10.000	10.000	
C. Liabilitas	10.000	10.000	
D. Liabilitas	10.000	10.000	
E. Liabilitas	10.000	10.000	
F. Liabilitas	10.000	10.000	
G. Liabilitas	10.000	10.000	
H. Liabilitas	10.000	10.000	
I. Liabilitas	10.000	10.000	
J. Liabilitas	10.000	10.000	
K. Liabilitas	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
L. Liabilitas	10.000	10.000	
M. Liabilitas	10.000	10.000	
N. Liabilitas	10.000	10.000	
O. Liabilitas	10.000	10.000	
P. Liabilitas	10.000	10.000	
Q. Liabilitas	10.000	10.000	
R. Liabilitas	10.000	10.000	
S. Liabilitas	10.000	10.000	
T. Liabilitas	10.000	10.000	

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PT. BPR NEHEMIA
Tanggal: 31 Desember 2021

Liabilitas & Ekuitas	31 Desember 2021		Aset
	31 Des 21	31 Des 20	
A. Liabilitas	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
B. Liabilitas	10.000	10.000	
C. Liabilitas	10.000	10.000	
D. Liabilitas	10.000	10.000	
E. Liabilitas	10.000	10.000	
F. Liabilitas	10.000	10.000	
G. Liabilitas	10.000	10.000	
H. Liabilitas	10.000	10.000	
I. Liabilitas	10.000	10.000	
J. Liabilitas	10.000	10.000	
K. Liabilitas	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
L. Liabilitas	10.000	10.000	
M. Liabilitas	10.000	10.000	
N. Liabilitas	10.000	10.000	
O. Liabilitas	10.000	10.000	
P. Liabilitas	10.000	10.000	
Q. Liabilitas	10.000	10.000	
R. Liabilitas	10.000	10.000	
S. Liabilitas	10.000	10.000	
T. Liabilitas	10.000	10.000	

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
PT. BPR NEHEMIA
Tanggal: 31 Desember 2021

Liabilitas & Ekuitas	31 Desember 2021		Aset
	31 Des 21	31 Des 20	
A. Liabilitas	10.000	10.000	LIABILITAS DAN EKUITAS PT. BPR NEHEMIA Tanggal: 31 Desember 2021
B. Liabilitas	10.000	10.000	
C. Liabilitas	10.000		

Demikian Laporan Tahunan 2024 ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja dan pencapaian BPR selama tahun berjalan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedepan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, serta pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Hormat Kami,

PT. BPR NEHEMIA



Edrianto Sitorus

Direktur Utama

Nimas Ayu Pamungkas

Direktur YMF Kepatuhan

Mengetahui

Rosi Rostianti

Komisaris Utama

Pahala Silitonga

Komisaris